



---

# PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021-2026

---



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, bahwa penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan sebagaimana mestinya

Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra Dinas Perhubungan harus dilakukan penyesuaian.

Selanjutnya dengan adanya Penyesuaian Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2021-2026, meskipun dalam prosesnya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi bersama. Demikian Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026 disusun. Tentunya terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini, untuk itu diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikannya.

Paringin, 25 Juli 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Balangan

  
**H. ABIJI, S.Pd, M.AP**

NIP. 19690813 199412 1 002

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan telah ditetapkannya rancangan awal Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2021-2026, yang memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Fungsi dan kedudukan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program dari RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini, dikembangkan dan disusun dengan mempertimbangkan dan berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 beserta lampirannya;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan tahun 2021-2026;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Nomor 800/ /SKT-DISDIKBUD/2021 tentang TIM Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026;

Pada akhirnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan ini akan dijadikan sebagai pedoman oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dan Pemangku kepentingan serta pemerhati Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, dan memonitoring serta mengevaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Balangan.

## **1.2 Dasar Hukum**

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256).
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta ketentuan pelaksanaannya.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52).
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
22. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Ftsik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271).

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
30. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16).
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95).
34. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021)
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra OPD disusun dengan maksud sebagai penjabaran dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dan dalam upaya meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dalam melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pemenuhan SPM Pendidikan) yaitu urusan pendidikan maupun urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode Tahun 2021-2026;
2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan periode Tahun 2021-2026;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam periode lima tahun ke depan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Terciptanya konsistensi pembangunan yang terintegrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara program Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Pusat.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan diBidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman serta tugas pokok pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

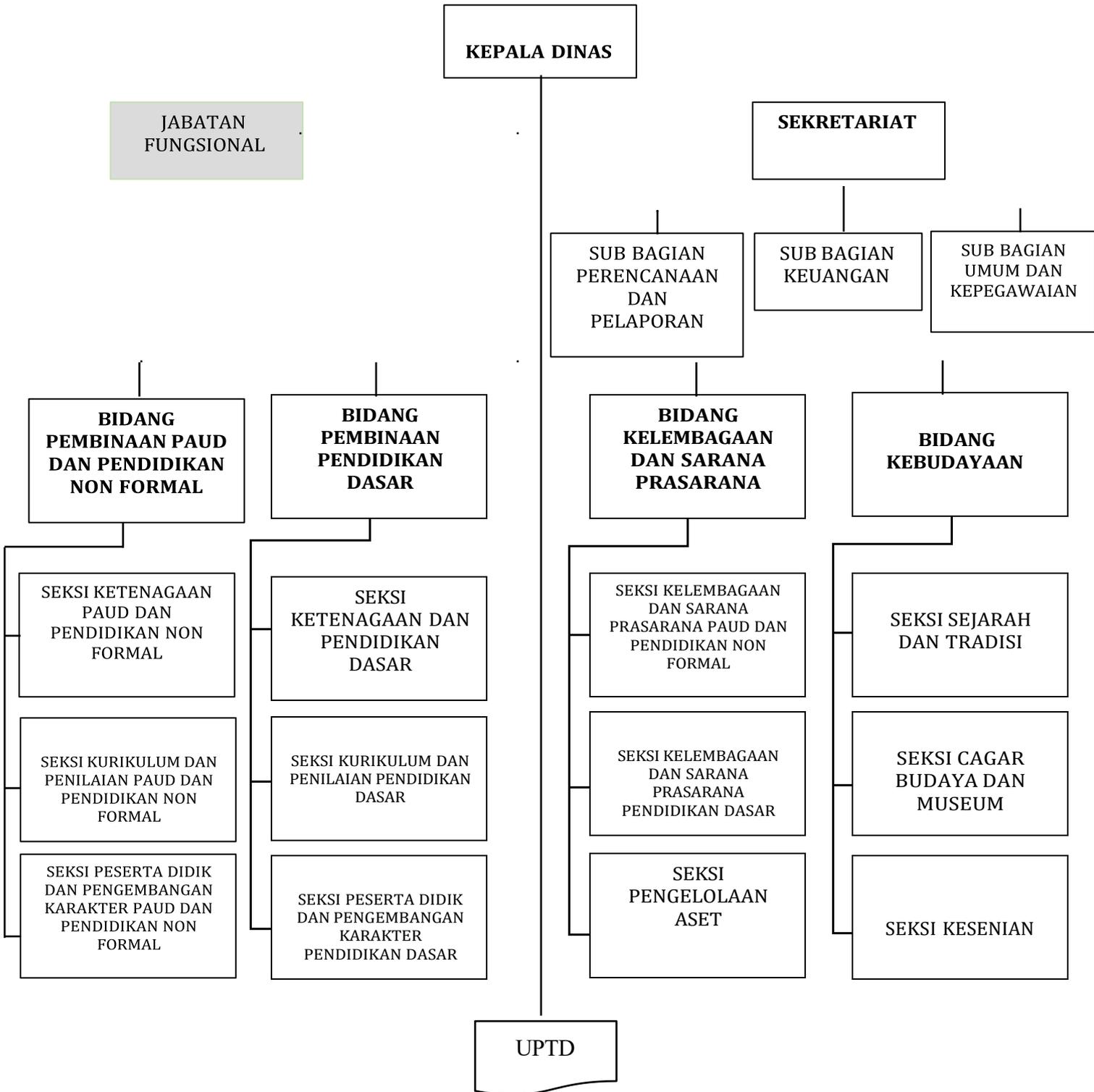
Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagara budaya, dan permusesuman;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen pendidik, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen pendidik, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
  1. Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
  2. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal
  3. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari :
  1. Seksi ketenagaah Pendidikan Dasar
  2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
  3. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan karakter Pendidikan Dasar
- e. Bidang Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana terdiri dari :
  1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal
  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Dasar
  3. Seksi Pengelolaan Aset
- f. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
  1. Seksi Sejarah dan Tradisi
  2. Seksi Cagar Budaya dan Museum
  3. Seksi Kesenian
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional (yang terdiri dari Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, dan Penilik)

**Gambar 1.1**  
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Balangan  
Tahun Anggaran 2021-2026



## **A. BAGIAN SEKRETARIAT**

Bagian Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian lingkup Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Dinas
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian lingkup Dinas.

- b. *Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;*

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas.

c. *Sub Bagian Keuangan.*

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Dinas.

## **B. BIDANG PENDIDIKAN DASAR**

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan ketenagaan pendidikan dasar, kurikulum dan penilaian pendidikan dasar serta peserta didik dan pengembangan karakter pendidikan dasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan ketenagaan pendidikan dasar;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kurikulum dan penilaian pendidikan dasar serta peserta didik; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peserta didik dan pengembangan karakter pendidikan dasar.

Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :

a. *Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar*

Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi dalam rangka pembinaan ketenagaan pendidik dasar.

b. *Seksi Kurikulum dan penilaian Pendidikan Dasar*

Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pembinaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Dasar.

*c. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pendidikan Dasar*

Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait peserta didik dan pengembangan karakter pendidikan dasar.

### **C. BIDANG KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA**

Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kelembagaan sarana prasarana paud dan pendidikan non formal, kelembagaan sarana prasarana pendidikan dasar serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kelembagaan sarana prasarana paud dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kelembagaan sarana prasarana pendidikan dasar; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan aset.

Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana terdiri dari :

*a. Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal*

Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi

dan supervisi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal.

*b. Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar*

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi dalam rangka pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar.

*c. Seksi Pengelolaan Aset*

Seksi Pengelolaan Aset mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi dalam rangka pengelolaan aset.

**D. BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan PAUD dan pendidikan non formal.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketenagaan PAUD dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peserta didik dan pengembangan karakter PAUD dan pendidikan non formal.

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :

1. *Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal*

Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi dalam rangka pembinaan ketenagaan PAUD dan pendidikan non formal.

2. *Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal*

Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pembinaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan Non Formal.

3. *Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal*

Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait peserta didik dan pengembangan karakter PAUD dan pendidikan Non Formal.

## **E. BIDANG KEBUDAYAAN**

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan sejarah dan tradisi, cagar budaya, sejarah dan museum serta kesenian.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan mempunyai tugas fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sejarah dan tradisi;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian cagar budaya, sejarah dan museum; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kesenian.

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

1. *Seksi Sejarah dan Tradisi*

Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan sejarah, pelestarian

tradisi, pendaftaran budaya tak benda serta pembinaan komunitas dan lembaga adat.

**2. Seksi Cagar Budaya dan Museum**

Seksi Cagar Budaya dan Museum mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

**3. Seksi Kesenian**

Seksi Kesenian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan kesenian.

**F. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan bersama-sama pembentukannya dengan Keputusan Kepala Daerah.

**G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan sesuai keahlian atau keterampilan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.

**2.2 Sumber Daya OPD**

Sumber daya perangkat daerah pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan terdiri dari :

**1. Sumber Daya Manusia**

(Pegawai Disdik, Guru / Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta didik).

**2. Prasarana**

(Lahan, Sekolah, Ruang Kelas/Belajar, Laboratorium, Ruang Penunjang Lainnya, Fasilitas Olahraga, Musholla, Ruang Kepala Sekolah dan Ruang Guru).

3. Sarana

(Meubelair, papan tulis, LCD, Buku Pelajaran, Bahan dan alat Praktikum, Alat Peraga, Buku Perpustakaan atau Buku Penunjang, bahan KBM lainnya, mobil dan bis angkutan pelajar, dan lain-lain);

4. Kurikulum Bahan Ajar

Sebagai acuan proses belajar mengajar (Kurikulum 2006 dan 2013, Kurikulum Muatan Lokal).

5. Dana

Dana sebagai sumber pembiayaan operasional lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dan Satuan Pendidikan, dana tersedia baik dari APBD II, APBD I dan APBN berupa DAK dan Dana Transfer.

Sumber daya tersebut diatas merupakan satu kesatuan atau komponen dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Balangan. Dalam menyelenggarakan pendidikan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dan UPTD memiliki SDM seluruhnya berjumlah 73 orang pegawai, yang terdistribusi pada sekretariat, Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar dan bidang-bidang serta UPTD.

Kemudian yang berstatus Non PNS/Honorer sebanyak 85 orang terdiri dari tenaga honorer laki-laki sebanyak 42 orang dan tenaga honorer perempuan sebanyak 43 orang juga terdistribusi pada sekretariat, dan bidang-bidang serta UPTD. Gambaran secara umum keadaan pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
Keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan  
Kabupaten Balangan dan UPT  
Keadaan 2016-2021

Unit Kerja	Jumlah Pegawai					
	PNS (orang)			Non PNS (orang)		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
1. Sekretariat	8	3	11	8	10	18
2. Bidang Pemb. PAUD dan PNF	4	4	8	4	1	5
3. Bidang Pemb. Pendidikan Dasar	6	3	9	6	7	13
4. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana	2	3	5	3	3	6
5. Bidang Kebudayaan	5	2	7	2	3	5
Korwil Kecamatan Paringin	1	1	2	0	3	3
Korwil Kecamatan Paringin Selatan	2	1	3	2	1	3
Korwil Kecamatan Lampihong	2	3	5	2	2	4
Korwil Kecamatan Batumandi	2	1	3	3	1	4
Korwil Kecamatan Awayan	2	0	2	2	3	5
Korwil Kecamatan Tebing	2	0	2	2	0	2

Penyesuaian Renstra Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan  
Kabupaten Balangan Tahun 2021  
- 2026

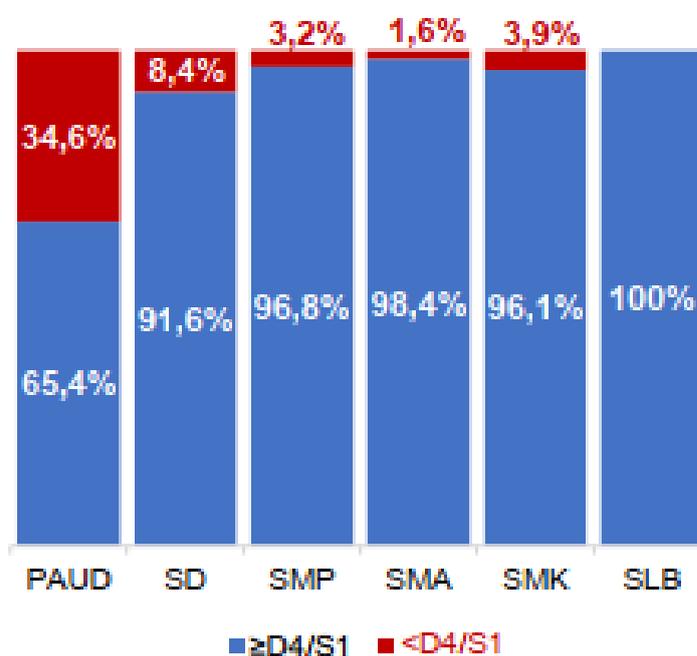
Tinggi							
Korwil Kecamatan Juai	1	0	1	1	3	4	
Korwil Kecamatan Halong	4	0	4	2	3	5	
Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar	3	8	11	5	3	8	
Penilik			8				
Pengawas			18				
Guru PAUD			84				478
Guru SD			1055				443
Guru SMP			196				90
Pamong Belajar			8				
<b>JUMLAH</b>		<b>1442</b>			<b>1096</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>2538</b>				

SKPD	JLH (ORG)	Kualifikasi Pendidikan	JLH (ORG)	PANGKAT	JLH (ORG)	Gol	JML (ORG)
<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<b>1889</b>	<b>SD</b>	23	<b>I/a</b>	2	<b>I</b>	40
		<b>SLTP</b>	26	<b>I/b</b>	11	<b>II</b>	307
		<b>SLTA</b>	121	<b>I/c</b>	5	<b>III</b>	1012
		<b>D1</b>	2	<b>I/d</b>	22	<b>IV</b>	530
		<b>D2</b>	90	<b>II/a</b>	95		
		<b>D3</b>	18	<b>II/b</b>	52		
		<b>D4</b>	0	<b>II/c</b>	135		
		<b>S1</b>	1564	<b>II/d</b>	25		
		<b>S2</b>	45	<b>III/a</b>	467		
		<b>S3</b>	0	<b>III/b</b>	299		
			20	<b>III/c</b>	157		
				<b>III/d</b>	89		
				<b>IV/a</b>	521		

**Gambar 1.2**

Grafik Keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan

Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang D4/S1  
Keadaan Tahun 2020



Dilihat dari data tabel dan grafik diatas terlihat komposisi SDM dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara persamaan Gender terlihat seimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan, secara pendidikan untuk ASN lebih banyak yang berkualifikasi S1 dan beberapa

orang S2, sedangkan pemenuhan Kualifikasi Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan sampai pada Tahun 2020 terlihat pada grafik pada Jenjang PAUD Kabupaten Balangan masih kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang S1.

Didalam (Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi guru) ketentuan Rasio Guru SD/MI Berkualifikasi Akademik per Sekolah adalah Perbandingan antara jumlah guru berkualifikasi minimum S1/DIV dengan jumlah sekolah SD/MI. "Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan menempati kantor yang berada di Jalan Ahmad Yani Km.2 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel. 2.2  
Komposisi Jumlah Perlengkapan

No	Barang Inventaris	Jumlah
1.	Komputer PC	44
2.	Laptop	19
3.	Printer	75
4.	Sound System	4

5.	Projektor	2
6.	LCD Projektor	3
7.	TV	2
8.	Server	4
9.	Kamera	2
10.	Vacum Cleaner	
11.	Sofa	5
12.	Lemari Es	8
13.	Dispenser	6
14.	CCTV	20
15.	Brankas	5
16.	Mesin Potong Rumput	1
17.	Sepeda Motor	252
18.	Mobil Dinas pejabat	2
19.	Mobil Operasional	1
20.	Mobil angkutan Pelajar	13
21	Bis Angkutan pelajar Tambahkan jumlah sekolah	5

### **2.3 Kinerja Pelayanan OPD**

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat yang harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sejalan dengan tujuan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan bertekad untuk untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing melalui pendidikan untuk Menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter. Kualitas potensi diri peserta didik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Balangan digambarkan dengan perubahan perilaku ke arah perilaku berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara dan masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab secara merata.

Capaian kinerja hasil pelayanan pendidikan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan tujuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mewujudkan pemerintahan yang baik dengan capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

*Penyesuaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026*

**Tabel. 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Lainnya	Target Resntra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun					Realisasi Capaian Resntra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>PENDIDIKAN</b>																			
1	Rata-rata Lama Sekolah	IKU			RPJMD	7.70	7.79	7.88	7.97	8.06	6.31	7.03	7.65	7.27	7.55	81.95	90.24	97.08	91.22	93.67
2	Harapan Lama Sekolah	IKU			RPJMD	11.10	12.54	12.83	13.12	13.41	11.10	12.07	12.20	12.37	12.46	100.00	96.25	95.09	94.28	92.92
3	APK PAUD	IKU			SDGS	51.2	37.51	37.72	37.97	38.23	66.06	34.76	70.27	74.07	71.77	129.02	92.67	186.29	195.08	187.73
4	APK SD/Sederajat	IKU			SDGS	105.96	106.01	106.11	106.24	106.44	104.54	104.5	103.12	100.11	98.78	98.66	98.58	97.18	94.23	92.80
5	APM SD/ sederajat	IKU			SDGS	87.64	87.79	87.96	88.16	88.41	86.11	85.78	91.4	85.01	90.94	98.25	97.71	103.91	96.43	102.86
6	Angka Kelulusan SD	IKU				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Nilai rata-rata nilai US SD	IKU				60	61	61.25	62	65	58.5	56.4	82.35	60.4	77.04	97.50	92.46	134.45	97.42	118.52
8	Persentase SD yang memenuhi SPM	IKU				80.5	83	85.6	85.6	85.75	80	82	85	85	92.18	99.38	98.80	99.30	99.30	107.50
9	persentase siswa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi	IKU				94	94	95	95	96	96.52	92.38	82.35	80.12	94.95	102.68	98.28	86.68	84.34	98.91
10	APK SMP/SEDERAJAT	IKU			SDGS	92.81	92.97	93.16	93.36	93.59	96.87	95.1	80.53	77.38	80.26	104.37	102.29	86.44	82.88	85.76
11	APM SMP/SEDERAJAT	IKU			SDGS	62.92	66.42	66.51	66.63	66.74	66.3	64.43	65.22	58.23	65.13	105.37	97.00	98.06	87.39	97.59
12	Angka Kelulusan SMP	IKU				99.9	100	100	100	100	100	100	100	99.57	99.46	100.10	100.00	100.00	99.57	99.46
13	Nilai rata-rata UN SMP	IKU				48.6	49	50	50.25	51.5	45.17	47.55	45.7	48.50	49.2	92.94	97.04	91.40	96.52	95.53
14	Persentase SMP yang memenuhi SPM	IKU				60.5	61.02	75	85	85.75	61	62	75	75.00	80	100.83	101.61	100.00	88.24	93.29
15	persentase siswa SMP melanjutkan ke jenjang lebih tinggi	IKU				92	93	94	94.5	95	96.52	95.88	73.66	95.67	95.41	104.91	103.10	78.36	101.24	100.43

*Penyesuaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026*

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Lainnya	Target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun					Realisasi Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
16	Guru TK/PAUD yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	IKU				42.36	64.73	64.85	65.03	65.17	48.07	51.04	55.38	53.95	91.03	113.48	78.65	65.40	82.96	139.68
17	Guru SD yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	IKU				70.67	75.55	76.16	76.23	76.31	74.6	74.38	79.72	81.20	92.78	105.26	97.93	104.67	106.52	121.58
18	Guru SMP yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	IKU				93.35	93.45	93.6	93.76	93.94	87.69	86.29	93.85	90.35	98.48	93.94	92.34	100.27	96.36	104.83
19	Persentase Guru SD bersertifikat	IKU				55	55.5	60	60.5	70	55.45	55.45	58.82	58.82	79.39	100.82	99.91	98.03	97.22	113.41
20	Persentase Guru SMP bersertifikat	IKU				45	65.00	70	75	80	48.34	48.34	52.43	52.43	96.04	107.42	74.37	74.90	69.91	120.05
21	Persentase Pengawas bersertifikat Pengawas Sekolah	IKU				100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat Kepala Sekolah	IKU				95	95.00	100	100	100	95	100	100	100	100	100	105.26	100	100	100
28	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun		SPM			0	0	100	100	100	0	0	66.55	66.55	66.55	0	0	66.55	66.55	66.55
29	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun		SPM			0	0	100	100	100	0	0	84.65	84.65	84.65	0	0	84.65	84.65	84.65
30	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun		SPM			0	0	100	100	100	0	0	80.36	80.36	80.36	0	0	80.36	80.36	80.36
31	tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			IKK		0	0	0	0	100	0	0	0	0	66.55	0	0	0	0	66.55
32	tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar			IKK		0	0	0	0	100	0	0	0	0	90.09	0	0	0	0	90.09
33	tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama			IKK		0	0	0	0	100	0	0	0	0	72.86	0	0	0	0	72.86
34	tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan			IKK		0	0	0	0	100	0	0	0	0	80.25	0	0	0	0	80.25

*Penyesuaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026*

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Lainnya	Target Resntra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun					Realisasi Capaian Resntra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
35	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	IKU									100%	100%	100%	100%	100%					
36	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	IKU									100%	100%	100%	100%	100%					
37	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	IKU									118.31	116.47	115.04	114.67	114.23					
38	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	IKU									95.44	90.26	90.56	90.72	91.94					
39	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	IKU									1175.77	1159.95	1163.86	1148.55	1143.8					
40	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	IKU									984.9	918.2	856.26	882.1	885.01					
41	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	IKU									1.12	1.12	1.12	1.12	1.12					
42	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	IKU									1.25	1.25	1.25	1.25	1.25					
43	Proporsi murid kelas1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	IKU									95.90%	93.81%	94.49%	91.54%	92.23%					
44	Angka melek huruf penduduk usia15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	IKU									97.75	97.78	98.76	98.77	99.78					
45	Penduduk yang berusia>15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	IKU									99.47%	99.60%	99.69%	99.70%	99.67%					
	<b>KEBUDAYAAN</b>																			
46	Jumlah Siswa Binaan dibidang seni Budaya	IKU			RPJMD	20	20	30	50	70	25.00	25.00	30.00	50	77	125.00	125.00	100	100	110
47	Jumlah Kegiatan Seni Budaya yang digelar dan diikuti	IKU			RPJMD	11	18	19	20	21	11	10	20	20	3	100	55.56	105.26	100	14.29
48	Jumlah Pengelolaan Benda Purbakala, Situs cagar Budaya yang dipelihara	IKU			RPJMD	4	5	6	7	8	0	10	5	5	8	0.00	200	88.33	71.43	100
49	Jumlah Peristiwa Sejarah dan Tradisi Daerah yang terdokumentasi dengan Lengkap	IKU			RPJMD	1	2	3	4	5	4	4	6	4	5	400	200	200	100	100

*Penyesuaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026*

**Tabel. 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan**  
**Tabel 2016-2020**

NO	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Realisasi Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.675.131.640	6.925.361.934	6.906.321.034	7.018.323.534	4.974.271.099	7.008.542.280	5.721.180.562	6.016.032.125	6.326.926.582	3.819.395.179	80,79	82,61	87,11	90,15	76,78	-17,50	66,66
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.811.551.874	7.567.750.250	4.315.000.000	2.467.150.000	3.829.350.000	4.425.818.170	6.044.565.566	4.009.045.610	2.196.125.050	3.372.216.800	91,98	79,87	92,91	89,01	88,06	-14,18	88,37
3	Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur		718.050.000	673.300.000	582.000.000	191.400.000		668.255.630	632.470.800	582.000.000	185.289.500			93,94	100,00	96,81	31,17	96,91
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	135.806.600	400.000.000	513.141.900	400.000.000	136.876.701	77.586.600	98.200.000	170.324.700	330.700.000	70.500.000	57,13	24,55	33,19	82,68	51,51	-78,85	49,81
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.658.004.390	6.306.399.805	6.337.425.360	2.591.673.140	5.584.273.850	1.464.323.210	4.870.356.350	5.381.220.800	2.136.652.390	5.347.107.945	88,32	77,23	84,91	82,44	95,75	-13,52	85,73
6	Program Wajib Belajar Pendidikan D asar Sembilan Tahun	28.188.258.781	27.049.918.600	30.786.975.000	18.920.766.000	29.103.472.760	26.815.810.168	22.132.360.160	28.677.069.590	16.844.874.750	27.857.327.080	95,13	81,82	93,15	89,03	95,72	-10,51	90,97
7	Program Pendidikan Menengah	7.411.609.990	14.476.084.000	15.360.777.075	9.810.765.000	12.650.556.500	7.017.774.087	12.027.025.462	13.040.615.678	8.965.841.448	11.519.640.005	94,69	83,08	84,90	91,39	91,06	-13,67	89,02
8	Program Pendidikan Non Formal	2.198.569.276	8.018.884.300	7.781.361.600	9.524.187.300	9.463.703.240	2.045.903.100	6.028.828.095	4.003.363.200	9.101.811.214	9.070.346.970	93,06	75,18	51,45	95,57	95,84	-26,35	82,22
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.398.864.800	2.340.485.800	3.229.770.000	2.159.688.000	1.295.999.101	2.165.780.205	2.035.663.735	2.763.999.750	1.936.660.959	1.120.739.101	90,47	86,98	85,58	89,67	86,48	-14,02	87,84
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		7.079.250.000	7.073.403.900	7.370.100.000	6.535.650.000		3.419.298.900	7.347.092.000	5.019.680.000	6.139.210.000		48,30	103,87	68,11	93,93	10,67	78,55
10	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		95.250.000	141.320.000	259.060.000	81.497.000		68.342.000	110.735.576	220.258.000	78.299.000		71,75	78,36	85,02	96,08	14,75	82,80
11	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		1.689.865.000	1.095.755.000	785.225.000	562.690.000		1.261.437.200	110.735.576	699.808.100	520.366.600		74,65	10,11	89,12	92,48	-145,00	66,59

Menurut Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, perkembangan IPM diseluruh Kabupaten Kota dikalimantan selatan, Kabupaten Balangan termasuk dalam tertinggi dalam peningkatan IPM. Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada sebagian besar kabupaten/kota. Selama periode 2019 hingga 2020, delapan kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM dan lima kabupaten mengalami penurunan IPM. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu **Kabupaten Balangan (tumbuh 0,63 persen)**, Kabupaten Tabalong (0,57 persen), dan Kabupaten Tanah Laut (0,49 persen). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut lebih didorong oleh dimensi pendidikan. Sementara, tiga kabupaten yang tumbuh paling rendah adalah Kota Banjarbaru (-0,15 persen), Kabupaten Kotabaru (-0,13 persen), dan Kota Banjarmasin (-0,08 persen). Rendahnya pertumbuhan ketiga kabupaten ini disebabkan oleh turunnya pengeluaran per kapita, sementara peningkatan pada dimensi lainnya tidak cukup mampu mengangkat IPM secara agregat.

**Gambar 1.3**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2019-2020

Provinsi/Kab/Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp 000)		IPM		Pertumbuhan (%) 2019-2020
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Tanah Laut	69,31	69,45	11,96	12,01	7,64	7,88	11 318	11 207	69,04	69,38	0,49
Kota Baru	69,10	69,21	11,92	11,93	7,42	7,43	11 731	11 530	68,95	68,86	-0,13
Banjar	66,97	67,21	12,28	12,44	7,34	7,35	12 681	12 603	68,94	69,18	0,35
Barito Kuala	65,88	66,09	12,38	12,39	7,33	7,34	9 952	9 805	66,24	66,22	-0,03
Tapin	70,23	70,40	11,86	11,94	7,75	7,76	12 088	11 841	70,13	70,11	-0,03
Hulu Sungai Selatan	65,82	65,97	12,10	12,17	7,74	7,75	12 835	12 672	68,80	68,85	0,07
Hulu Sungai Tengah	65,82	66,01	12,19	12,20	7,99	8,00	12 257	12 153	68,80	68,84	0,06
Hulu Sungai Utara	63,58	63,83	12,88	12,91	7,37	7,53	9 772	9 527	65,49	65,59	0,15
Tabalong	70,33	70,44	12,59	12,72	8,78	9,10	11 476	11 283	71,78	72,19	0,57
Tanah Bumbu	70,08	70,34	12,36	12,37	7,71	7,96	12 025	11 718	70,50	70,71	0,30
Balangan	67,59	67,72	12,37	12,46	7,27	7,55	11 557	11 452	68,39	68,82	0,63
Kota Banjarmasin	70,98	71,13	13,92	13,93	9,94	9,95	14 547	14 306	77,16	77,10	-0,08
Kota Banjar Baru	71,87	71,99	14,80	14,81	10,94	10,95	13 949	13 675	79,22	79,10	-0,15
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>68,49</b>	<b>68,66</b>	<b>12,52</b>	<b>12,68</b>	<b>8,20</b>	<b>8,29</b>	<b>12 253</b>	<b>12 032</b>	<b>70,72</b>	<b>70,91</b>	<b>0,27</b>

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS di Kabupaten Balangan selama kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan dari 6,31 tahun pada tahun awal Renstra Dinas Pendidikan menjadi 7,55 tahun diakhir tahun periode Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Walaupun terjadi sedikit peningkatan namun untuk di bandingkan Kabupaten lain se Propinsi Kalimantan Selatan sudah mampu berada di peringkat 8 dari 13 Kabupaten/Kota padahal Balangan merupakan salah satu Kabupaten termuda di Propinsi Kalimantan Selatan.

Pada akhir masa periode Renstra Dinas Pendidikan untuk RLS masih dibawah target yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Target akhir di Kabupaten Balangan RLS pada periode Rentsra 2016-2021 adalah 8,06 dan capaiannya adalah 7,55. Artinya, secara rata-rata penduduk Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,55 tahun atau hampir menamatkan kelas VII jenjang SMP. Kabupaten Balangan secara urutan Provinsi berada pada urutan ke 8 dari 13 dalam capaian RLS.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Target akhir di Kabupaten Balangan HLS pada periode Rentsra 2016-2021 adalah 13,41 dan capaiannya adalah sebesar 12,46. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,46 tahun atau setara dengan Diploma I.

Pada akhir masa periode Renstra Dinas Pendidikan untuk HLS masih dibawah target yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Target akhir di Kabupaten Balangan HLS pada periode Rentsra

2016-2021 adalah 13,41 dan capaiannya adalah 12,46. Kabupaten Balangan secara urutan Provinsi berada pada urutan ke 8 dari 13 dalam capaian HLS.

Berapa penyebab tidak tercapainya target pada akhir periode Rentsra 2016-2021 adalah adanya Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, Susah Akses pendidikan khususnya daerah terpencil, belum adanya pemetaan kebutuhan guru sehingga kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum merata, kurangnya jumlah guru bersertifikasi, belum optimalnya jumlah guru dengan jenjang pendidikan Strata 1, belum optimalnya jumlah guru yang mendapatkan pelatihan, masih adanya angka putus sekolah, belum optimalnya pendidikan kesetaraan.

**Tabel. 2.5**

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Capaian Pelayanan Dasar (SPM) Pendidikan Kabupaten Balangan  
Tahun 2020

No	Jenjang pendidikan	Jumlah penduduk	Jumlah murid perjenjang	Persentase penerima layanan
1	PAUD (5-6 tahun)	4.819	3.207	66,55
2	Dasar (7-15 tahun)	22.149	18.750	84,65
3	Kesetaraan (7-18 tahun)	29.488	23.665	80,36

**Tabel. 2.7**

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar  
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1811	1791	1786	1761	1733
1.2	Jumlah Murid	14846	14817	15085	14949	1543
1.3	Rasio	1:8	1:8	1:8	1:8	1:9 (1144,4)
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	642	621	614	601	605
2.2	Jumlah Murid	6017	5977	5840	5616	5780
2.3	Rasio	1:9	1:10	1:10	1:9	1:10 (1047,7)

**Tabel. 2.9**

Capaian Indikator Kebudayaan Kabupaten Balangan  
Tahun 2017-2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
16.	Kebudayaan				
16.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	17	8	17	1
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	7	8	8	10

16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	4	5	5	8
------	--	---	---	---	---

Penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya dilaksanakan satu kali yaitu gelar seni budaya, sedangkan untuk kegiatan lainnya ditiadakan karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 terdapat 10 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, delapan di antaranya dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Makam Kandang Haji, Rumah Palimbangan Desa Riwa, Rumah Batu Desa Muara Ninian, Makam Datu Martika, Kawasan Lama Lampihong, Makam Raksasina Singa Jaya, Makam Tumenggung Jalil dan Benteng Tundakan, sedangkan dua dikelola oleh pusat yaitu Mesjid syuhada Desa Hujan Mas dan Rumah Bubungan Tinggi Desa Tarangan. Persoalan dalam pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya adalah perlunya pemeliharaan fisik untuk menjaga cagar budaya dari kerusakan ataupun kepunahan.

**Tabel 2.10**

Capaian Indikator SPM Kesenian  
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun			
			2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian					
		Cakupan Kajian Seni 50%	27	40	26,66	20
		Cakupan Fasilitas Seni 30%	57	57	33,33	0
		Cakupan Gelar Seni 75%	75	75	50	25

	Misi Kesenian 100%	100	100	100	0
2	Sarana dan Prasarana				
	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	42,85	42,85	42,85	42,85
	Cakupan Tempat 100%	100	100	100	100
	Cakupan Organisasi 34%	0	66,66	66,66	66,66

Cakupan kajian seni pada tahun 2020 hanya 20% berupa dokumentasi (bentuk buku/katalog), Penyerapan narasumber (setiap ada kegiatan SDM daerah yang menjadi narasumber), Inventarisasi (penyimpanan alat- alat kesenian). Untuk Cakupan Fasilitas Seni, cakupan misi kesenian dan Cakupan Gelar Seni tidak memenuhi standar, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sehingga untuk kegiatan kesenian ditiadakan. Cakupan Organisasi yang dimiliki Kabupaten Balangan adalah organisasi struktural yang menangani kesenian dan Lembaga/Dewan Kesenian Balangan. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian di Kabupaten Balangan adalah sarjana seni, seniman dan insan media masa.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan**

Telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pembangunan sektor Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing bidang. Untuk urusan pendidikan dalam Kabupaten difokuskan pada program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan, sedangkan untuk urusan Kebudayaan lebih difokuskan pada pengembangan Kebudayaan Daerah, Kesenian Traditional, Sejarah, Cagar Budaya, Permuseuman dan Cagar Budaya Daerah.

Secara singkat **tantangan** OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan adalah :

1. Adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan pendidikan yang bermutu;
2. Adanya mobilitas penduduk yang tinggi yang berpotensi menimbulkan masalah pendidikan baru;
3. Penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga ada wilayah-wilayah tertentu yang padat penduduknya;
4. Tumbuhnya pelayanan pendidikan swasta yang mutunya lebih baik;
5. Masih adanya budaya masyarakat yang tidak menguntungkan bagi upaya pembangunan pendidikan;

Sedangkan **Peluang** pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan adalah

- a. Adanya dukungan DPRD Kabupaten Balangan serta pemangku kepentingan lain dalam pembangunan pendidikan
- b. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD
- c. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah termasuk di dalamnya adalah Standar Nasional Pendidikan
- d. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan
- e. Munculnya organisasi-organisasi baru yang bergerak di bidang pendidikan yang dapat dimanfaatkan sebagai mitra dalam membangun kualitas pendidikan
- f. Adanya program dan kebijakan prioritas Kepala Daerah terpilih yang baru yang mendukung pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Balangan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan**

Balangan merupakan kabupaten hasil pemekaran kabupaten Hulu Sungai Utara. Kabupaten Balangan terdiri atas delapan kecamatan dengan ibukota di Paringin. Kondisi geografis di Balangan sebagian besar didominasi oleh hutan karet dan persawahan. Hal ini berarti bahwa pendapatan sebagian besar penduduk dari menoreh dan bertani. Kondisi mata pencaharian ini tidak hanya dikerjakan oleh orang tua atau orang-orang yang produktif saja, tetapi dapat dikerjakan oleh anak dibawah produktif atau anak usia sekolah. Hal ini berdampak pada masih adanya anak yang belum bersekolah atau putus sekolah bukan karena ekonomi tak mampu tetapi karena pekerjaan sehari-hari telah dapat memberikan penghasilan bagi anak usia sekolah. Dampak ini pun meluas, orang tua atau masyarakat kurang berminat melirik pendidikan.

Memantapkan Program Wajar Dikdas, Pemerintah mengambil kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berarti bahwa biaya untuk pendidikan dasar diharapkan sangat murah bahkan dimungkinkan adanya sekolah gratis.

Selain itu, Pemerintah telah berupaya memenuhi kebutuhan guru secara kualitas maupun kuantitas, serta persebaran dan proporsional, antara lain melalui penerimaan pegawai baru, pengangkatan guru honor menjadi PNS, dan pengangkatan guru kontrak melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tentu saja hal ini juga dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana, selain faktor pendukung pendidikan lainnya seperti buku pelajaran, perpustakaan, ruang UKS.

Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Balangan jauh dari perguruan-perguruan tinggi negeri, namun karena semangat guru agar

bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan perundangan yang berlaku, kondisi tersebut tidak menjadi kendala.

Pemerintah sangat memahami masih belum terpenuhinya penghasilan guru yang memadai dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, pemerintah masih terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru. Sejak beberapa tahun terakhir pemerintah telah menjalankan program dan kebijakan:

1. Pemberian insentif berupa subsidi bagi guru swasta serta pengawas sekolah yang nilainya terus ditingkatkan
2. Pemberian penghargaan kepada guru yang berprestasi dan guru yang mempunyai dedikasi tinggi, melalui seleksi guru berprestasi
3. Bahkan untuk kepentingan kesejahteraan namun tidak menggalkan faktor pelayanan masyarakat difasilitasinya guru untuk mengikuti sertifikasi.

Disamping memberikan pelayanan penuntasan wajib belajar sembilan tahun, Pemerintah juga memberikan layanan pendidikan di luar usia wajib belajar, seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, sekolah menengah, bahkan dimungkinkan akan dibuka pelayanan pendidikan luar biasa dan perguruan tinggi.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk berkembangnya potensi anak sejak dini (0 – 6 tahun) sehingga mereka dapat berkembang secara wajar sebagai anak. Sasaran PAUD tidak hanya mempersiapkan anak pada usia masuk sekolah dasar, melainkan juga agar anak-anak memperoleh rangsangan-rangsangan intelektual, sosial, dan emosional yang disesuaikan dengan tingkat usianya. Pada gilirannya nanti akan berdampak pada kesiapan anak masuk sekolah sehingga diharapkan tidak terjadi mengulang kelas dan putus sekolah, minimal dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun.

Pemberantasan buta aksara bertujuan agar penduduk atau masyarakat dapat melek huruf atau bebas dari buta huruf. Ada tiga tahapan penanganan buta huruf yakni pemberantasan, pembinaan dan

pelestarian yang penanganannya dipadukan dengan program pusat dan propinsi. Pemerintah telah melakukan upaya pemberantasan buta huruf melalui pembelajaran dan pembinaan melalui keaksaraan fungsional.

Dalam upaya pemberantasan buta huruf Pemerintah kabupaten memprogramkan sejumlah sasaran Keaksaraan Fungsional yang tidak terdapat dalam Program dari Provinsi maupun Pusat. Untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat unit pelaksana pendidikan atau sekolah, maka telah dikembangkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan pendidikan berbasis masyarakat. Dalam pelaksanaannya, MBS melalui langkah-langkah yang secara bertahap diharapkan akan lebih operasional antara lain, melalui sosialisasi dan diseminasi, perintisan penerapan, reorganisasi dan untuk menetapkan pelaksanaan MBS pada mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Berkaitan dengan kurikulum, dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan pembangunan, peran pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan yang menguasai iptek dan imtaq memiliki pengetahuan dan teknologi memiliki posisi yang sangat penting. Oleh karena itu kurikulum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah dikembangkan ke sekolah-sekolah dengan harapan akan terbentuk satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum hasil modifikasi bahkan kreasi guru, bukan sekedar kurikulum hasil adaptasi.

Dalam rangka penataan manajemen yang lebih luas, pengelolaan pendidikan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas. Oleh karena itu, telah diberlakukan berbagai aturan yang akan menjadi acuan dalam peningkatan pengelolaan pendidikan, antara lain sistem perencanaan dan penganggaran, pembinaan ketenagaan, pengelolaan sarana dan prasarana, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta hubungan kerja dengan lembaga-lembaga pendidikan.

Manajemen pendataan dengan system Pedati Web sangat membantu berbagai pengguna untuk menggunakan data secara akurat

dan cepat. Dengan adanya jaringan pendidikan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sangat memfasilitasi kabupaten untuk pengembangannya, sehingga melalui jaringan induk tersebut dapat diperluas pengguna-pengguna jaringan. Hingga saat ini telah bisa menikmati jaringan pendidikan di sejumlah sekolah. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala terutama kendala geografis pada sekolah tertentu. Kondisi geografis menjadi kendala karena pertimbangan efisiensi anggaran yang menyebabkan sekolah jauh belum dapat menikmati fasilitas jaringan.

Pengorganisasian aparat diarahkan ke manajemen berbasis kinerja. Hal ini berkaitan dengan MoU dengan Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan Good Governance, di samping Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan juga melaksanakan peningkatan kapasitas baik kuantitas maupun kualitas, layanan sektor publik, pencegahan terhadap upaya-upaya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, peningkatan kesadaran antikorupsi, serta pemberian kesempatan pengaduan bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas secara kuantitas dilaksanakan dengan peningkatan jumlah aparat dalam pemberian layanan publik, sedangkan secara kualitas dilaksanakan dengan penyediaan buku-buku acuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan atau mengikutsertakan dalam diklat dan sejenisnya.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis.

Menyikapi hal demikian analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan aturan/kebijakan agar sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan.

Oleh karena itu dalam menentukan tingkat keberhasilan harus pula disertai dengan tingkat kesiapan fungsi secara sistemik melalui kajian analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat).

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan yang mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang didalamnya mencakup (1) sumber daya aparatur ; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut adalah sebagai berikut :

## **Analisis Internal**

### **1. Kekuatan**

Potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan Pemerintah Balangan antara lain :

- a. Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan secara bersinambungan, efektif efisien dan bersinerji menuju arah sasaran peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terukur dan terkendali. Hal ini telah dibuktikan dengan diraihnya prestasi kejuaraan baik dalam penguasaan materi akademis maupun non akademis seperti prestasi olahraga ditingkat propinsi, nasional maupun internasional. Adanya perbaikan yang terus menerus dari seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Balangan untuk mendukung dan memantapkan misi Kabupaten Balangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Tersedianya sumberdaya aparatur kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan.

- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan representatif yang siap untuk menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dunia Global. Hal ini dapat dilihat dari asset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran gedung persekolahan, jaringan internet (LAN) dan yang lainnya serta didukung dengan operator operator yang handal dan terampil.
- d. Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai sekolah. Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.
- e. Tersedianya organisasi seni dan budaya di Kabupaten Balangan yang jumlah dan minatnya untuk pengembangan kebudayaan semakin meningkat.

## **2. Kelemahan**

Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pendidikan juga tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah pemahaman bagi masyarakat tentang arti pentingnya Pendidikan. Dalam kehidupan sosial masih muncul berbagai permasalahan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai akibat belum stabilnya kondisi Ekonomi yang mengakibatkan banyaknya anak rawan dan putus sekolah, faktor budaya yang sangat kental mempengaruhi perilaku anak disamping masih terdapat anak- anak yang masuk usia sekolah tapi enggan untuk bersekolah dan beberapa kasus pernikahan usia dini.

Di sisi lain peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius, karena di beberapa kecamatan yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten kondisinya masih belum memadai dalam proses belajar mengajar.

Sementara itu Otonomi Daerah telah merangsang perubahan Aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Dilain pihak kemampuan tenaga kependidikan untuk

mengembang tugasnya secara profesional melalui pelatihan-pelatihan masih perlu ditingkatkan.

Pembangunan pendidikan didalamnya mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru, metode pembelajaran, dan murid. Permasalahan pendidikan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mencapai IPM yang ditargetkan adalah :

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan jangkauan layanan pendidikan bagi usia dini dan usia sekolah secara berkeadilan adalah:
  - 1) Masih rendahnya angka partisipasi kasar PAUD
  - 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai berdampak pada angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni, juga angka putus sekolah. Masih terdapat desa yang belum memiliki PAUD dan masih adanya kesulitan akses menuju sekolah pada desa terpencil
  - 3) Belum optimalnya pendidikan kesetaraan dalam melayani masyarakat yang tidak mampu mengakses pendidikan formal. Hal ini disebabkan oleh masih sedikitnya program kelompok belajar serta masih kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.
  
- b. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan **jangkauan layanan pendidikan** bagi remaja dan orang dewasa adalah:
  - 1) Masih ada penduduk di Kabupaten Balangan yang buta aksara, meskipun jumlahnya sedikit
  - 2) Masih rendahnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi untuk memberikan keterampilan bagi remaja dan orang dewasa
  - 3) Angka rata-rata lama sekolah masih berkisar pada 7,55 tahun (Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,55 tahun atau hampir menamatkan kelas 1 SMP)

- 4) Angka harapan lama sekolah masih berkisar pada 12,46 tahun (Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,46 tahun atau setara dengan hampir menamatkan kelas 3 SLTA)
  - 5) Belum tercapainya target pendidikan wajib belajar 12 tahun
- c. Permasalahan yang dihadapi dalam **peningkatan layanan pendidikan** sekolah yang bermutu adalah :
- 1) Masih rendahnya persentase satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi secara lokal
  - 2) Masih rendahnya persentase SD yang terakreditasi A
  - 3) Masih rendahnya persentase SMP yang terakreditasi A
  - 4) Masih rendahnya persentase SD yang berpredikat sekolah Adiwiyata
  - 5) Masih rendahnya persentase yang berpredikat sekolah Adiwiyata;
  - 6) Belum terpenuhinya capaian indikator SPM pada sekolah SD
  - 7) Masih rendahnya persentase satuan pendidikan pada Bina SD yang sudah melaksanakan kurikulum pendidikan karakter
  - 8) Masih rendahnya persentase capaian indikator SPM pada jenjang PAUD
  - 9) Masih rendahnya persentase capaian indikator SPM pada jenjang Pendidikan Dasar
  - 10) Masih rendahnya persentase satuan pendidikan jenjang SMP yang sudah melaksanakan kurikulum pendidikan karakter.
- d. Permasalahan yang dihadapi dalam **peningkatan efektifitas layanan pendidikan** adalah:
- 1) Masih adanya anak putus sekolah tingkat SD
  - 2) Upaya mempertahankan angka kelulusan SD
  - 3) Upaya mempertahankan angka kelulusan Paket A
  - 4) Upaya mempertahankan angka melanjutkan siswa SD/MI

- 5) Masih adanya anak putus sekolah tingkat SMP
  - 6) Upaya mempertahankan angka kelulusan SMP
  - 7) Upaya mempertahankan angka kelulusan Paket B
  - 8) Upaya meningkatkan angka melanjutkan siswa SMP/MTs
  - 9) Upaya mempertahankan angka kelulusan Paket C
- e. Permasalahan yang dihadapi dalam **peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan** adalah :
- 1) Upaya meningkatkan PTK Tk dan PAUD yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 ( 65,04 % )
  - 2) Upaya meningkatkan angka PTK SD yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 ( 92,78 % )
  - 3) Upaya meningkatkan angka PTK SMP yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 ( 94,48 % )
  - 4) Belum adanya pemetaan kebutuhan guru sehingga kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum merata
- f. Permasalahan yang dihadapi dalam **pengembangan Seni dan Budaya Balangan** :
- 1) Minimnya SDM dalam pengembangan seni dan budaya tradisional di Balangan
  - 2) Masih kurangnya sarana prasarana untuk mendukung kegiatan aktivitas seni bagi para pelaku seni/sanggar seni/komunitas seni (tempat latihan/kegiatan, kostum, alat musik)
  - 3) Tidak adanya Tim ahli Cagar budaya balangan
- g. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan **layanan dan akuntabilitas** adalah:
- 1) Upaya tindak lanjut temuan BPK/Inspektorat;
  - 2) Upaya peningkatan indeks kepuasan pelayanan internal;
  - 3) Nilai evaluasi SAKIP yang masih CC;

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan yang menjadi masalah pokok pada urusan pendidikan adalah seperti tabel dibawah :

**Tabel 2.12**  
Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia  
dan Permasalahan Bidang Sosial Budaya

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan lama Sekolah	1. Rendahnya rasio gedung sekolah dengan penduduk	1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai  2. Susah Akses pendidikan khususnya daerah terpencil
	2. Rendahnya rasio guru dengan murid	1. Belum adanya pemetaan kebutuhan guru sehingga kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum merata.
	3. Rendahnya kompetensi guru	1. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi 2. Belum optimalnya jumlah guru dengan jenjang pendidikan Strata 1 3. Belum optimalnya jumlah guru yang mendapatkan pelatihan
	4. Belum tercapainya target pendidikan wajib belajar 12 tahun	Masih adanya angka putus sekolah

	5. Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	Belum optimalnya pendidikan kesetaraan
--	--	--

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
Belum optimalnya Budaya Balangan yang terlestarikan	Belum Optimalnya Pengembangan Seni dan Budaya Balangan	Rendahnya penyelenggaraan festival seni dan budaya
		Belum optimalnya pemeliharaan fisik cagar budaya
		Kurang optimalnya pengembangan seni dan budaya Balangan

### **3.1.1 Isu Strategis Urusan Pendidikan dan Kebudayaan**

Isu strategis bidang pengembangan sumber daya manusia merupakan hasil analisa permasalahan di bidang pendidikan yaitu perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Balangan. Pada bidang pendidikan, masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan sehingga perlunya peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi

guru dan sarana prasarana. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Pada aspek kebudayaan, Kabupaten Balangan sejauh ini masih memiliki kendala belum optimalnya perawatan cagar budaya, dan belum optimalnya pengembangan seni dan budaya Balangan secara berkala dikarenakan pandemic Covid 19. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan perawatan cagar budaya Balangan, dengan menggali dari sisi value apabila cagar budaya tersebut lestari dan dapat memiliki nilai tambah salah satunya menarik potensi wisata edukasi. Kemudian terkait pengembangan seni dan budaya Balangan yang terkendala pandemi Covid 19, sangat diperlukan upaya serta terobosan penyesuaian normal baru.

## **Analisis Eksternal**

### **1. Peluang**

Peluang yang ada atau memungkinkan dan menjadi daya dukung:

1. Tersedianya anak usia sekolah (4-6 tahun) dan usia sekolah (7-15 tahun)
2. Kondisi alam dan lingkungan sekolah mendukung
3. Tersedianya daya tampung bagi anak usia sekolah
4. Adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap prioritas pembangunan pendidikan
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendirikan sekolah swasta
6. Tersedianya guru yang telah mengikuti pelatihan pada tingkat regional maupun nasional
7. Adanya perhatian organisasi kemasyarakatan untuk bergerak dalam pemberantasan buta aksara, seperti PKBM, LSM, Karang taruna, Aisyiah/Muslimat NU, Pramuka dan Remaja Masjid.

## **2. Tantangan**

Yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain :

### **a. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**

1. Sedikitnya satuan pendidikan prasekolah kurang mendukung meningkatnya angka partisipasi murni
2. Prasarana belajar (gedung/ tempat belajar dan mebeler) yang sangat minim kurang kondusif untuk strategi pembelajaran Prasekolah
3. Sarana bermain dan alat peraga yang minim kurang mendukung pendekatan pembelajaran usia prasekolah
4. Belum optimalnya manajemen TK dan PAUD
5. Kurangnya lembaga kursus seperti kursus keterampilan kerja, kursus estetika dan kursus etika dan kepribadian yang diminati oleh masyarakat agar cepat bekerja.

### **b. Bidang Pendidikan Dasar**

1. Masih ada anak usia sekolah yang karena kondisi geografis belum dapat menikmati pendidikan dasar
2. Prasarana belajar (gedung/ tempat belajar dan mebeler) yang sangat minim kurang kondusif untuk strategi pembelajaran
3. Sarana praktik dan alat peraga yang minim kurang mendukung pendekatan pembelajaran usia prasekolah
4. Belum optimalnya manajemen Sekolah Dasar
5. Adanya anggapan sebagian masyarakat yang secara finansial dan akademik kurang mampu memandang bahwa pendidikan merupakan beban yang sangat berat
6. Belum terpenuhinya harapan masyarakat terhadap hasil pendidikan yang masuk dalam dunia kerja dan persaingan global
7. Belum optimalnya sistem manajemen, sehingga potensi akademik calon peserta didik belum terjamin mutunya
8. Masih rendah angka partisipasi karena rendahnya kemampuan orang tua dan masyarakat untuk membiayai pendidikan

9. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya sekolah pada anak-anak mereka

Melihat kekuatan maupun kelemahan yang ada, secara faktual Kabupaten Balangan memiliki peluang untuk dapat berkembang sebagai Kota Pendidikan yang dapat memberikan layanan tidak hanya terhadap masyarakat Kabupaten namun dapat terus diperluas kepada masyarakat di sekeliling Kabupaten Balangan, bahkan untuk masyarakat dimanapun yang mendambakan pelayanan pendidikan yang baik. Dengan ditangani secara sinergi dalam sistem pengembangan pada bidang-bidang lainnya di Kabupaten Balangan, bidang pendidikan dapat membuka peluang kerja yang luas, serta secara tidak langsung bersentuhan dengan dinamisasi kegiatan ekonomi masyarakat luas.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **Visi**

Untuk menyikapi permasalahan pembangunan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Balangan maka dicanangkanlah Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang merupakan Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu :

**“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA,  
MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU  
DAN SEJAHTERA”**

Visi “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera” terdiri atas tiga pokok visi yakni:

1. Membangun Desa, yakni mengembangkan kawasan pedesaan dan konektivitasnya di Kabupaten Balangan.
2. Menata Kota, yakni menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan.

3. Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan.

Ketiga pokok visi tersebut pada dasarnya merujuk pada kondisi akhir tercapainya Balangan yang Maju dan Sejahtera. Maju dan Sejahtera pada hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Perumusan visi Kabupaten Balangan lima tahun kedepan diuraikan ke dalam tabel, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.13**

Perumusan Visi Kabupaten Balangan 2021-2026

No	Masalah	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Belum Terwujudnya Pembangunan Pedesaan yang Ideal serta belum maksimalnya Konektivitas di setiap Desa Kabupaten Balangan	Membangun Desa	Membangun desa, menata kota menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera
2	Belum Terwujudnya Sentra Daerah Perkotaan di Kabupaten Balangan	Menata Kota	
3	Belum Tercapainya standar IPM yang diharapkan di	Maju dan Sejahtera	

Kabupaten Balangan		
--------------------	--	--

### **Misi**

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

**1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.**

Misi ini dilandasi oleh kondisi Balangan terkait dengan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk pemukiman, ekonomi, transportasi, pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur desa dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan.

**2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif**

Misi ini dilandasi oleh kondisi perekonomian daerah Balangan yang masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas. Hal ini mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.

**3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.**

Misi ini dilandasi oleh kondisi kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan, dan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.

**4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.**

Misi ini di landasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

**5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.**

Misi ini dilandasi kondisi masih rendahnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani, upaya dalam pelestarian seni dan budaya, peningkatan kerukunan umat beragama, serta belum maksimalnya kinerja pemerintahan mengharuskan daerah untuk mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Melihat dari uraian Diatas visi misi yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah pada **Visi uraian ke 3** yaitu Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan. Dinas pendidikan dan Kebudayaan diharapkan mampu memberikan support dalam peningkatan IPM dengan Program Kegiatan yang dilaksanakan, dan diturunkan dalam Sasaran Meningkatkan Angka Rata-Rata lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Sedangkan visi terkait pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan adalah pada **Misi ke 3 dan ke 5**, yaitu dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan, dan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan maksimalnya kinerja pemerintahan daerah untuk mewujudkan kehidupan kebudayaan.

Faktor-faktor pendorong ketercapaian dari Visi Misi pada Urusan Dinas pendidikan adalah melihat dari Kebijakan dan Program yang ada pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan yang mendukung dari Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Daerah, pemerataan peningkatan Layanan dari jenjang PAUD sampai dengan Pendidikan Menengah Pertama. Sedangkan untuk urusan Kebudayaan, Kabupaten Balangan memiliki Situs-situs Cagar Budaya dan Kesenian Daerah yang lumayan banyak, ini memiliki potensi untuk lebih mudah dalam pengembangan Kebudayaan ke masa akan datang.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan**

#### **Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk :

**“MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI,  
DAN BERKEPRIBADIAN MELALUI TERCIPTANYA PELAJAR  
PANCASILA YANG BERNALAR KRITIS, KREATIF, MANDIRI,  
BERIMAN, BERTAKWA KEPADA TUHAN YME, DAN BERAKHLAK  
MULIA, BERGOTONG ROYONG, DAN BERKEBINEKAAN GLOBAL”**

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan

pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

### **Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor **(1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia**; nomor **(5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa**; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

### **Visi dan Misi serta Isu Strategis dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan**

Isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Selatan dalam lima tahun mendatang yaitu:

#### **Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan memberikan dampak positif kepada pemerataan kesejahteraan

masyarakat sehingga kehidupan setiap penduduk Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing akan menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu memanfaatkan peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Saat ini, sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya.

**Tabel 2.14**

Sinkronisasi Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan  
Prioritas Daerah Kabupaten Balangan Tahun yang diampu Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026

No.	Nawa Cita Tahun 2020- 2024	Prioritas Daerah Prov.Kalsel Tahun 2021- 2026	Prioritas Daerah Kab. Balangan Tahun 2021- 2026	Misi Kepala Daerah Kab. Balangan Tahun 2021- 2026	Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021- 2026
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia (Nawacita 1)	Peningkatan SDM Melalui Perkuatan Sistem Kesehatan, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Keterampilan, dan	Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Meningkatnya Indeks Pendidikan

No.	Nawa Cita Tahun 2020- 2024	Prioritas Daerah Prov.Kalsel Tahun 2021- 2026	Prioritas Daerah Kab. Balangan Tahun 2021- 2026	Misi Kepala Daerah Kab. Balangan Tahun 2021- 2026	Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021- 2026
		Penanganan Masalah Sosial			
2	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa (Nawacita 5)	Peningkatan SDM Melalui Perkuatan Sistem Kesehatan, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Keterampilan, dan Penanganan Masalah Sosial	kehidupan sosial, budaya, dan agama yang kondusif	Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Balangan

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Balangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200). Secara umum Kabupaten Balangan masih

menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam memenuhi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang sudah dan belum mencapai target nasional.

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Balangan, kondisi umum 17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup. Selain itu juga mempertimbangkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas yang merupakan hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis dalam konsultasi publik oleh pemangku kepentingan yang perlu diselesaikan adalah 1) Kemiskinan; 2) Ketersediaan air bersih; **3) Pendidikan Berkualitas**, 4) Penanggulangan Bencana; 5) Degradasi Sumberdaya alam dan lingkungan; 6) Persampahan, limbah, dan sanitasi yang layak; 7) Ketimpangan Infrastruktur pengembangan antar wilayah; dan 8)

KesehatanTerkait dengan kajian KLHS yang perlu diselesaikan adalah pendidikan berkualitas sehingga untuk mencapai tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan menetapkan tujuan ..... dengan berbagai kebijakan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan**

Untuk merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis tahun 2021-2026 yang lebih jelas menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

##### **a. Tujuan**

Didasarkan kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan pendidikan jangka menengah Kabupaten Balangan, sebagai berikut :

Meningkatnya Indeks Pendidikan merupakan tujuan yang akan dituju oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena dalam target Makro daerah dalam RPJMD Kabupaten Balangan masih menargetkan Peningkatan IPM, ini berarti indeks penyusunnya dan turunannya dalam SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah **Meningkatnya Indeks Pendidikan**, yang indikatornya adalah Angka rata-rata lama sekolah dan Angka Harapan lama Sekolah. Kemudian pada urusan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan bertujuan **Meningkatnya Budaya Balangan yang dilestarikan**, yang indikatornya adalah Persentase Budaya tak benda yang dilestarikan dan Persentase Budaya Benda yang dilestarikan

##### **b. Sasaran**

Sasaran strategis adalah menjabarkan dari tujuan suatu kegiatan yang akan dihasilkan atau akan dicapai yang sifatnya sangat spesifik dan nyata. Untuk memudahkan mencapai sesuatu tujuan tersebut maka sasaran Urusan Pendidikan adalah :

**Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya.**

*Penyesuaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026*

**TUJUAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2021 – 2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,82	8,09	8,36	8,63	8,90	9,17
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,59	12,72	12,85	12,98	13,11	13,24
2	Meningkatnya Budaya Balangan yang Dilestarikan	Persentase Budaya Tak Benda yang Terlestarikan	27%	65%	73%	85%	92%	100%
		Persentase Budaya Benda yang Dilestarikan	60%	66,67%	73,33%	80%	86,67%	100%

**Tabel 2.15**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan OPD tahun 2021-2026

**Visi : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA**

**Misi : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT BALANGAN**

**MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN YANG HARMONIS  
DAN KONDUSIF**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan	Angka Partisipasi sekolah anak Usia 5-6 tahun		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Angka Partisipasi sekolah pendidikan dasar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Angka Partisipasi pendidikan kesetaraan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

*Penyesuaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026*

		Meningkatkan Mutu Pendidikan	Nilai raport pendidikan Kabupaten kategori hijau (Indeks SPM)				66,65 Tuntas Muda	69,00 Tuntas Muda	70,00 Tuntas Pratama	72,00 Tuntas Pratama
2	Meningkatnya Budaya Balangan yang dilestarikan	Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan		60%	66,67%	73,33%	80%	86,67%	100%

Indikator keberhasilan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK )
- 2) Meningkatkan angka partisipasi murni (APM)
- 3) Meningkatnya nilai rerata ujian nasional
- 4) Menurunnya angka mengulang
- 5) Menurunnya angka putus sekolah
- 6) Meningkatnya angka kelulusan
- 7) Perbandingan ruang kelas dan siswa
- 8) Meningkatnya ketersediaan ruang perpustakaan
- 9) Perbandingan alat peraga dan siswa
- 10) Perbandingan buku pelajaran UN dan siswa
- 11) Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1 PGTK
- 12) Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1 PGSD
- 13) Meningkatnya jumlah guru SLTP kualifikasi S1
- 14) Meningkatnya jumlah guru SLTA kualifikasi S1
- 15) Berkurangnya angka buta aksara pada usia kurang dari lima belas tahun
- 16) Persentase Lembaga adat yang dibina dengan baik
- 17) Jumlah mega event kebudayaan yang dibuat dengan skala besar dan berdampak langsung pada masyarakat
- 18) Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota
- 19) Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan
- 20) Persentase cagar budaya yang dikelola

## **BAB V**

### **STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN**

#### **a. Strategi**

Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran Resntra.

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah
2. Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah
3. Meningkatkan Budaya Balangan yang Terlestarikan

**Tabel 2.16**

Tujuan Sasaran dan Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan

**MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA**

<b>Misi Ke-3 : "Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan"</b>			
<b>TUJUAN SKPD</b>		<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
1	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan	Meningkatkan rata-rata lama sekolah
		Meningkatkan Mutu Pendidikan	Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah
<b>Misi Ke-5 : "Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif"</b>			
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
2	Meningkatnya Budaya Balangan yang dilestarikan	Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Kebudayaan

**b. Kebijakan**

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, arah kebijakan ditempuh dengan upaya-upaya sebagaimana tersaji dalam Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.17**

**Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat  
Balangan**

<b>ARAH KEBIJAKAN</b>					
<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>Misi Ke -3 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan</i>					
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan
Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi
Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan
<i>Misi Ke -5 : Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif</i>					
Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.
Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya

Visi : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA							
Misi Ke-3 : "Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan"							
TUJUAN SKPD		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatnya Indeks Pendidikan	1	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan	1	Peningkatan rata-rata lama sekolah	1. Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan  2. Peningkatan ketersediaan Satuan Pendidikan di daerah terpencil  3. Peningkatan pemetaan kebutuhan guru sehingga kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan  4. Peningkatan jumlah guru bersertifikasi  5. optimalisasi jumlah guru	
			Meningkatkan Mutu Pendidikan	2	Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah		

						<p>dengan jenjang pendidikan minimal Strata 1</p> <p>6. optimalisasi jumlah guru yang mendapatkan pelatihan</p> <p>7. Penurunan angka putus sekolah</p>
<b>Misi Ke-5 : "Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif"</b>						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
2	Meningkatnya Budaya Balangan yang dilestarikan	1	Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	29	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	<p>1. Peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya</p> <p>2. optimalisasi pemeliharaan fisik cagar budaya</p> <p>3. optimalisasi pengembangan seni dan budaya Balangan</p>

**Tabel 2.2.19**

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Target Capaian

<b>Visi : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA</b>												
<b>Misi Ke-3 : "Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan"</b>												
<b>TUJUAN</b>		<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>Kondisi Awal</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Kondisi Akhir</b>
3	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah Angka Harapan lama sekolah	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan	Angka Partisipasi sekolah anak Usia 5-6 tahun		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Angka Partisipasi sekolah pendidikan dasar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Angka Partisipasi pendidikan kesetaraan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Meningkatkan Mutu Pendidikan	Nilai raport pendidikan Kabupaten kategori hijau (Indeks SPM)				66,65 Tuntas Muda	69,00 Tuntas Muda	70,00 Tuntas Pratama	72,00 Tuntas Pratama	72,00 Tuntas Pratama
<b>Misi Ke-5 : "Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif"</b>												

*Penyesuaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026*

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
5	Meningkatnya Budaya Balangan yang dilestarikan	Persentase Budaya tak benda yang terlestarikan Persentase Budaya Benda yang dilestarikan	Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan		60%	66,67%	73,33%	80%	86,67%	100%	100%

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1 Program, kegiatan dan sub kegiatan dan Indikator**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

#### **PENDIDIKAN**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**

*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

*Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*

*Daerah*

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan Mebel

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*

*Daerah*

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Pengelolaan Pendidikan**

*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*

Penambahan Ruang Kelas Baru

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Pengadaan Perlengkapan Siswa

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa  
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik  
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada  
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*

Penambahan Ruang Kelas Baru  
Pembangunan Perpustakaan Sekolah  
Pembangunan Laboratorium  
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah  
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah  
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah  
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah  
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium  
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah  
Pertama  
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa  
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik  
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah  
Menengah Pertama  
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

*Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD  
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD  
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru  
PAUD  
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan

Utilitas PAUD

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Pengelolaan Dana BOP PAUD

*Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Nonformal/Kesetaraan

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan

Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan

Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada

Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

**3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

*Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga*

*Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan*

*Nonformal/Kesetaraan*

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi

Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

**4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

*Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang*

*Diselenggarakan oleh Masyarakat*

Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat

## **KEBUDAYAAN**

### **5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

*Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah  
Kabupaten/Kota*

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia  
Kesenian Tradisional

Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

### **6. Program Pembinaan Sejarah**

*Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi  
Sejarah

### **7. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**

*Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*

Penetapan Cagar Budaya

*Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*

Pelindungan Cagar Budaya

Pemanfaatan Cagar Budaya

*Penyesuaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026*

Tabel 2.20

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kebudayaan

Fungsi	Sesaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (ou toom) dan Kegiatan (ou tpu 0)	Date Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi								
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
L.01.01.01			PROGRAM PELAKSANAAN URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN	Pemrosesan pengabdian/pelayanan publik/urusan pemerintahan daerah	100	100	%	169.105.445.362	100	%	169.105.445.362	100	%	136.015.988.896	100	%	204.617.588.884	100	%	225.079.347.770	100	%	287.587.282.965	100	%	287.587.282.965	
L.01.01.01			Pelayanan, Peningkatan, dan Dukung Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik/urusan pemerintahan daerah	100	100	%	112.250.000	100	%	112.250.000	100	%	129.475.000	100	%	139.822.500	100	%	149.494.750	100	%	164.345.225	100	%	164.345.225	
L.01.01.01.01			Pelayanan dan Dukungan Perangkat Daerah	layah dukungan pelayanan perangkat daerah	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0
L.01.01.01.01			Unit Kerja Perangkat Daerah	layah dukungan unit kerja perangkat daerah	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
L.01.01.01.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik/urusan pemerintahan daerah	100	100	%	164.634.835.794	100	%	164.634.835.794	100	%	131.038.318.329	100	%	199.208.151.262	100	%	219.128.896.889	100	%	281.041.863.027	100	%	281.041.863.027	
L.01.01.01.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan	jabatannya pelayanan masyarakat/pelayanan publik/urusan pemerintahan daerah	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
L.01.01.01.02.01			Pembayaran Perumahan dan Pengadaan Jasa Kerja/Konsumsi	jabatannya pelayanan masyarakat/pelayanan publik/urusan pemerintahan daerah	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
L.01.01.01.02.01			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik/urusan pemerintahan daerah	100	100	%	242.300.000	100	%	242.300.000	100	%	296.530.000	100	%	293.183.000	100	%	322.501.300	100	%	394.751.430	100	%	394.751.430	
L.01.01.01.02.01			Pengadaan Pakat dan Biaya Antar Kalangan	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	130	1	1	1	130	1	1	1	130	1	1	1	130	1	1	130	1	1	1	130	1	1	1
L.01.01.01.02.01			Beban Taksi Operasional dan Perawatan Kendaraan	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
L.01.01.01.02.05			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik/urusan pemerintahan daerah	100	100	%	1.481.794.088	100	%	1.481.794.088	100	%	1.629.973.497	100	%	1.792.970.846	100	%	1.972.267.931	100	%	2.169.494.724	100	%	2.169.494.724	
L.01.01.01.02.05.01			Penyediaan Kebutuhan Material	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0
L.01.01.01.02.05.01			Penyediaan Perawatan dan Penggantian	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0
L.01.01.01.02.05.01			Penyediaan Perawatan Rokok	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0
L.01.01.01.02.05.01			Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
L.01.01.01.02.05.01			Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
L.01.01.01.02.05.01			Pengalangan Rokok Kanvas dan Kanvas	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
L.01.01.01.02.07			Pengadaan Barang Milik Daerah	Pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik/urusan pemerintahan daerah	100	100	%	607.868.000	100	%	607.868.000	100	%	688.654.800	100	%	735.520.280	100	%	809.072.308	100	%	889.975.959	100	%	889.975.959	
L.01.01.01.02.07.01			Pengadaan Kendaraan dan Operasional	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	16	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0
L.01.01.01.02.07.01			Pengadaan Mebel	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
L.01.01.01.02.07.01			Pengadaan dan Perawatan Gedung	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
L.01.01.01.02.08			Penyediaan Jasa Penunjang	Pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik/urusan pemerintahan daerah	100	100	%	940.906.000	100	%	940.906.000	100	%	1.034.996.600	100	%	1.139.496.260	100	%	1.252.346.836	100	%	1.377.580.475	100	%	1.377.580.475	
L.01.01.01.02.08.01			Penyediaan Jasa Penyusunan	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
L.01.01.01.02.08.02			Penyediaan Jasa Konsultasi, Saran	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
L.01.01.01.02.08.03			Pelayanan dan Perawatan	Pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik/urusan pemerintahan daerah	100	100	%	1.030.891.900	100	%	1.030.891.900	100	%	1.188.980.650	100	%	1.307.819.715	100	%	1.438.696.587	100	%	1.582.932.245	100	%	1.582.932.245	
L.01.01.01.02.08.03.01			Pelayanan dan Perawatan	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
L.01.01.01.02.08.03.02			Pelayanan dan Perawatan	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
L.01.01.01.02.08.03.03			Pelayanan dan Perawatan	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
L.01.01.01.02.08.03.04			Pelayanan dan Perawatan	layah pelaksanaan antar golongan/antar instansi	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0

**Penyesuaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026**

Kategori	Kode	Nama Kegiatan	Uraian Kegiatan	2021			2022			2023			2024			2025			2026							
				Anggaran	Unit	%	Anggaran	Unit	%	Anggaran	Unit	%	Anggaran	Unit	%	Anggaran	Unit	%	Anggaran	Unit	%					
Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	1.01.02	Meningkatnya index Pendidikan	PROGRAMPENYUSUNANREKAMASPELAKSANAAN	Uraian: penyiapan anggaran regasus untuk 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	89,86	85,25	%	62.562.847,307	85,25	%	62.562.847,307	85,25	%	100.124,890.507	87,05	%	106.669.325.287	87,65	%	110.006.168.842	88,25	%	115.981.444.294	88,25	%	517.765.268.487
	1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Uraian: penyiapan anggaran regasus untuk 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	90,09	91,59	%	27.336.935,307	91,59	%	27.336.935,307	93,09	%	27.336.935,307	94,59	%	27.299.369,727	96,09	%	27.299.320,916	97,59	%	27.291.246,266	97,59	%	126.452.578,323
	1.01.02.2.01.01	Penyediaan Sarana Sekolah Dasar (SD)	Uraian: penyediaan Sarana Sekolah Dasar (SD)	1	SDH		1.064.000.000	1	SDH	1.064.000.000	1	SDH	1.170.400.000	1	SDH	1.276.200.000,00	1	SDH	1.382.000.000,00	1	SDH	1.488.000.000,00	1	SDH	1.594.000.000,00	
	1.01.02.2.01.02	Pembinaan Ruang Kelas Baru	Uraian: pembinaan Ruang Kelas Baru	2	sekolah		479.000.000	2	sekolah	479.000.000	2	sekolah	526.800.000	2	sekolah	574.200.000,00	2	sekolah	621.600.000,00	2	sekolah	669.000.000,00	2	sekolah	716.400.000,00	
	1.01.02.2.01.03	Penyediaan Ruang Guru/Tempat Sekolah/TK	Uraian: penyediaan Ruang Guru/Tempat Sekolah/TK	2	sekolah		479.000.000	2	sekolah	479.000.000	1	sekolah	247.000.000	1	sekolah	271.700.000,00	1	sekolah	296.200.000,00	1	sekolah	320.700.000,00	1	sekolah	345.200.000,00	
	1.01.02.2.01.04	Penyediaan Ruang Urafi, Guruh atau Sekolah	Uraian: penyediaan Ruang Urafi, Guruh atau Sekolah	4	sekolah		928.000.000	4	sekolah	928.000.000	4	sekolah	928.000.000	3	sekolah	741.000.000,00	3	sekolah	741.000.000,00	3	sekolah	741.000.000,00	17	sekolah	4.199.000.000	
	1.01.02.2.01.05	Penyediaan Perbaikan Sekolah	Uraian: penyediaan Perbaikan Sekolah	4	sekolah		948.000.000	4	sekolah	948.000.000	4	sekolah	948.000.000	4	sekolah	948.000.000,00	4	sekolah	948.000.000,00	4	sekolah	948.000.000,00	20	sekolah	4.715.000.000	
	1.01.02.2.01.06	Penyediaan Sarana, Peralatan dan Bahan Sekolah	Uraian: penyediaan Sarana, Peralatan dan Bahan Sekolah	10	sekolah		2.470.000.000	10	sekolah	2.470.000.000	10	sekolah	2.470.000.000	10	sekolah	2.470.000.000,00	10	sekolah	2.470.000.000,00	10	sekolah	2.470.000.000,00	30	sekolah	12.370.000.000	
	1.01.02.2.01.07	Penyediaan Ruang dan Ruang Kelas	Uraian: penyediaan Ruang dan Ruang Kelas	1	sekolah		271.000.000	1	sekolah	271.000.000	1	sekolah	271.000.000	1	sekolah	271.000.000,00	1	sekolah	271.000.000,00	1	sekolah	271.000.000,00	3	sekolah	1.355.000.000	
	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sekolah/Tempat Ruang Kelas	Uraian: rehabilitasi Sekolah/Tempat Ruang Kelas	8	sekolah		1.976.000.000	8	sekolah	1.976.000.000	8	sekolah	1.976.000.000	8	sekolah	1.976.000.000,00	8	sekolah	1.976.000.000,00	8	sekolah	1.976.000.000,00	40	sekolah	9.900.000.000	
	1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Ruang Guru/Tempat Sekolah/TK	Uraian: rehabilitasi Ruang Guru/Tempat Sekolah/TK	4	sekolah		760.000.000	4	sekolah	760.000.000	4	sekolah	760.000.000	4	sekolah	760.000.000,00	4	sekolah	760.000.000,00	4	sekolah	760.000.000,00	20	sekolah	3.800.000.000	
	1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sekolah/Tempat Ruang Urafi, Guruh atau Sekolah	Uraian: rehabilitasi Sekolah/Tempat Ruang Urafi, Guruh atau Sekolah	3	sekolah		900.000.000	3	sekolah	900.000.000	3	sekolah	900.000.000	3	sekolah	900.000.000,00	3	sekolah	900.000.000,00	3	sekolah	900.000.000,00	23	sekolah	4.900.000.000	
	1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sekolah/Tempat Perbaikan Sekolah	Uraian: perbaikan sekolah yang rusak	4	sekolah		736.000.000	4	sekolah	736.000.000	4	sekolah	736.000.000	4	sekolah	736.000.000,00	4	sekolah	736.000.000,00	4	sekolah	736.000.000,00	20	sekolah	3.800.000.000	
	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sekolah/Tempat Sarana, Peralatan dan Bahan Sekolah	Uraian: sarana dan peralatan di lokasi sekolah yang rusak	12	sekolah		2.214.200.000	12	sekolah	2.214.200.000	12	sekolah	2.214.200.000	12	sekolah	2.214.200.000,00	12	sekolah	2.214.200.000,00	12	sekolah	2.214.200.000,00	60	sekolah	11.074.000.000	
	1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Ruang dan Ruang Kelas	Uraian: ruang dan ruang kelas yang rusak	1	sekolah		190.000.000	1	sekolah	190.000.000	1	sekolah	190.000.000	1	sekolah	190.000.000,00	1	sekolah	190.000.000,00	1	sekolah	190.000.000,00	3	sekolah	900.000.000	
	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Meja Sekolah	Uraian: pengadaan Meja Sekolah	1794	unit/paket		1.928.000.000	1794	unit/paket	1.928.000.000	1794	unit/paket	1.928.000.000	1794	unit/paket	1.928.000.000,00	1794	unit/paket	1.928.000.000,00	1794	unit/paket	1.928.000.000,00	8970	unit/paket	7.640.000.000	
	1.01.02.2.01.15	Pengadaan Rak Buku Sekolah	Uraian: pengadaan Rak Buku Sekolah	300	Buah		300.000.000	300	Buah	300.000.000	300	Buah	300.000.000	300	Buah	300.000.000,00	300	Buah	300.000.000,00	300	Buah	300.000.000,00	1300	Buah	1.500.000.000	
	1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perbaikan Sekolah	Uraian: perbaikan Perbaikan Sekolah	35	Unit		39.500.000	35	Unit	39.500.000	35	Unit	39.500.000	35	Unit	39.500.000,00	35	Unit	39.500.000,00	35	Unit	39.500.000,00	263	Unit	2.915.000.000	
	1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perbaikan Sarana	Uraian: perbaikan Sarana	3900	eksemplar		196.400.000	3900	eksemplar	196.400.000	4017	eksemplar	202.292.000	4137,3	eksemplar	208.260,760,00	4262	eksemplar	214.611,382,20	4389	eksemplar	221.049.950,28	20706	eksemplar	1.042.714.273	
	1.01.02.2.01.18	Penyediaan Sarana Peralatan Pendidikan	Uraian: sarana dan peralatan pendidikan	642	Orang		324.000.000	642	Orang	324.000.000	642	Orang	324.000.000	642	Orang	324.000.000,00	642	Orang	324.000.000,00	642	Orang	324.000.000,00	3210	Orang	1.620.000.000	
	1.01.02.2.01.19	Penyediaan Sarana Peralatan Pendidikan	Uraian: sarana dan peralatan pendidikan	176	sekolah		44.240.000	176	sekolah	44.240.000	176	sekolah	44.240.000	176	sekolah	44.240.000,00	176	sekolah	44.240.000,00	176	sekolah	44.240.000,00	176	sekolah	224.200.000	
	1.01.02.2.01.20	Penyediaan Sarana Peralatan Pendidikan	Uraian: sarana dan peralatan pendidikan	176	sekolah		89.680.000	176	sekolah	89.680.000	176	sekolah	89.680.000	176	sekolah	89.680.000,00	176	sekolah	89.680.000,00	176	sekolah	89.680.000,00	176	sekolah	448.400.000	
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Sarana Peralatan Pendidikan	Uraian: sarana dan peralatan pendidikan																							
	1.01.02.2.01.22	Penyediaan Sarana Peralatan Pendidikan	Uraian: sarana dan peralatan pendidikan																							
	1.01.02.2.01.23	Penyediaan Sarana Peralatan Pendidikan	Uraian: sarana dan peralatan pendidikan	2	Registasi		34.246.000	2	Registasi	34.246.000	2	Registasi	60.320.600	2,06	Registasi	66.368.660,00	2	Registasi	73.000.026,00	2	Registasi	80.200.028,60	10	Registasi	334.240.213	
	1.01.02.2.01.24	Penyediaan Sarana Peralatan Pendidikan	Uraian: sarana dan peralatan pendidikan	10	sekolah		71.000.000	10	sekolah	71.000.000	10	sekolah	71.000.000	10	sekolah	71.000.000,00	10	sekolah	71.000.000,00	10	sekolah	71.000.000,00	30	sekolah	3.530.000.000	
	1.01.02.2.01.25	Pengadaan Sarana Peralatan Pendidikan	Uraian: sarana dan peralatan pendidikan	173	sekolah		10.642.419.307	173	sekolah	10.642.419.307	176	sekolah	10.698.319.307	177	sekolah	10.727.019.307,00	177	sekolah	10.727.019.307,00	178	sekolah	10.752.219.307,00	178	sekolah	38.390.486.353	

**Penyesuaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026**

L.01.023.02	Pangaldan Pendidikan Sabahh Menehng Pemas	Tngan partkpal vnsya negra uba 13-15 tahun salan pangaldan manngah pmas	72,66			9.207.946.000			74,26			9.207.946.000			76,26			9.375.580.900			77,96			10.123.013.660			79,66			10.756.300.026			81,36			11.388.290.029			83,06			51.395.490.915		
					%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%									
1.01.027.02.02	Pembinaan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	1	lulus	259.300.000	1	lulus	259.300.000	1	lulus	265.430.000	1	lulus	267.400.000,00	1	lulus	211.530.000,00	1	lulus	253.500.000,00	3	lulus	1.457.000.000																					
1.01.027.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/PA	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/PA	1	selesai	259.300.000	1	selesai	259.300.000	1	selesai	265.430.000	1	selesai	267.400.000,00	1	selesai	211.530.000,00	1	selesai	253.500.000,00	3	selesai	1.457.000.000																					
1.01.027.02.04	Pembangunan Ruang/Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang/Unit Kesehatan Sekolah	1	selesai	247.000.000	1	selesai	247.000.000	1	selesai	271.700.000	1	selesai	296.400.000	1	selesai	520.530.000,00	1	selesai	544.500.000,00	3	selesai	1.479.750.000																					
1.01.027.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																																											
1.01.027.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium SIKP	1	selesai	523.000.000	1	selesai	523.000.000	1	selesai	537.500.000																																	
1.01.027.02.07	Pembangunan Ruang Sertu Guru/Hub	Jumlah Pembangunan Ruang Sertu Guru/Hub	2	selesai	470.000.000	2	selesai	470.000.000	2	selesai	317.000.000	2	selesai	304.000.000	2	selesai	911.000.000	2	selesai	911.000.000	10	selesai	2.775.000.000																					
1.01.027.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Pembangunan Fasilitas Parkir	1	selesai	259.300.000	1	selesai	259.300.000	1	selesai	265.430.000	1	selesai	267.400.000,00	1	selesai	211.530.000,00	1	selesai	253.500.000,00	3	selesai	1.457.000.000																					
1.01.027.02.11	Pembangunan Karim Sekolah	Jumlah Pembangunan Karim Sekolah	4	selesai	234.000.000	4	selesai	234.000.000	4	selesai	279.400.000	5	selesai	298.430.000	5	selesai	517.300.000	5	selesai	526.530.000	17	selesai	1.483.300.000																					
1.01.027.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4	selesai	933.000.000	4	selesai	933.000.000	4	selesai	1.036.900.000	4	selesai	1.183.900.000	4	selesai	1.284.400.000	4	selesai	1.525.200.000	20	selesai	3.923.000.000																					
1.01.027.02.13	Raheliliml Sading Bara Gakun Galahab	Jumlah gakan galahab yang dibangun	2	selesai	578.000.000	2	selesai	578.000.000	2	selesai	415.000.000	2	selesai	435.900.000	2	selesai	491.400.000	2	selesai	529.200.000	10	selesai	2.298.000.000																					
1.01.027.02.14	Raheliliml Sading Bara Ruang Kabin Sekolah	Jumlah Ruang Kabin Sekolah yang dibangun	5	selesai	741.000.000	5	selesai	741.000.000	5	selesai	813.100.000	5	selesai	899.200.000	5	selesai	995.500.000	5	selesai	1.027.400.000	13	selesai	4.449.000.000																					
1.01.027.02.15	Raheliliml Sading Bara Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang dibangun	2	selesai	120.000.000	2	selesai	120.000.000	2	selesai	152.000.000	2	selesai	144.000.000	2	selesai	136.000.000	2	selesai	163.000.000	10	selesai	720.000.000																					
1.01.027.02.16	Raheliliml Sading Bara Ruang/Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	Jumlah Ruang/Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	2	selesai	500.000.000	2	selesai	500.000.000	2	selesai	550.000.000	2	selesai	590.000.000	2	selesai	590.000.000	2	selesai	420.000.000	10	selesai	1.800.000.000																					
1.01.027.02.17	Raheliliml Sading Bara Reperawatan Sekolah	Jumlah perawatan sekolah yang dibangun	1	selesai	139.000.000	1	selesai	139.000.000	1	selesai	207.900.000	1	selesai	226.300.000	1	selesai	243.700.000	1	selesai	264.600.000	3	selesai	1.154.000.000																					
1.01.027.02.18	Raheliliml Sading Bara Laboratorium	Jumlah laboratorium yang dibangun	2	selesai	450.000.000	2	selesai	450.000.000	2	selesai	475.000.000	2	selesai	319.000.000	1	selesai	357.300.000	1	selesai	339.000.000	3	selesai	2.313.300.000																					
1.01.027.02.19	Raheliliml Sading Bara Ruang Sertu Guru/Hub	Jumlah Ruang Sertu Guru/Hub yang dibangun	1	selesai	175.000.000	1	selesai	175.000.000	1	selesai	175.000.000	1	selesai	175.000.000	1	selesai	175.000.000	1	selesai	175.000.000	3	selesai	875.000.000																					
1.01.027.02.20	Raheliliml Sading Bara Ruang Dlln Kapas Sabahh Guru/Pangas Sekolah	Jumlah Ruang Dlln Kapas Sabahh Guru/Pangas Sekolah yang dibangun	1	selesai	193.000.000	1	selesai	193.000.000	1	selesai	181.300.000	1	selesai	190.000.000	1	selesai	214.300.000	1	selesai	251.000.000	3	selesai	990.000.000																					
1.01.027.02.22	Raheliliml Sading Bara Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang dibangun	2	selesai	132.000.000	2	selesai	132.000.000	2	selesai	197.200.000	2	selesai	182.400.000	2	selesai	197.900.000	2	selesai	212.300.000	10	selesai	912.000.000																					
1.01.027.02.24	Raheliliml Sading Bara Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	4	selesai	430.000.000	4	selesai	430.000.000	4	selesai	493.000.000	4	selesai	340.000.000	4	selesai	383.000.000	4	selesai	650.000.000	20	selesai	2.700.000.000																					
1.01.027.02.25	Pangaldan Mabal Sekolah	Jumlah Pangaldan Mabal Sekolah	2	selesai	530.000.000	2	selesai	530.000.000	2	selesai	583.000.000	2	selesai	420.000.000	2	selesai	453.000.000	2	selesai	490.000.000	10	selesai	2.100.000.000																					
1.01.027.02.26	Pangaldan Mabr Rurahh Bngga Sekolah																																											
1.01.027.02.27	Pangaldan Parlangsan Sekolah	Jumlah Pangaldan Parlangsan Sekolah	4	selesai	900.000.000	4	selesai	900.000.000	4	selesai	960.000.000	4	selesai	720.000.000	4	selesai	780.000.000	4	selesai	840.000.000	20	selesai	3.600.000.000																					
1.01.027.02.28	Pangaldan Parlangsan Dlln	Jumlah Pangaldan Parlangsan Dlln	2000	rls	73.000.000	2000	rls	73.000.000	2000	rls	73.000.000	2000	rls	73.000.000	2000	rls	73.000.000	2000	rls	73.000.000	10000	rls	573.000.000																					
1.01.027.02.29	Pangaldan Dlln Parlangsan Dlln Sabahh Menehng Pemas	Jumlah Dlln Parlangsan Dlln Sabahh Menehng Pemas	730	rlg	330.000.000	730	rlg	330.000.000	730	rlg	330.000.000	730	rlg	330.000.000	730	rlg	330.000.000	730	rlg	330.000.000	3750	rlg	4.230.000.000																					
1.01.027.02.30	Pangaldan Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln																																											
1.01.027.02.31	Pangaldan Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	Jumlah Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	5	Ergulae	230.000.000	5	Ergulae	230.000.000	5	Ergulae	230.000.000	5	Ergulae	230.000.000	5	Ergulae	230.000.000	5	Ergulae	230.000.000	13	Ergulae	1.230.000.000																					
1.01.027.02.32	Pangaldan Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	Jumlah Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	23	Selesai	173.000.000	23	Selesai	173.000.000	23	Selesai	173.000.000	23	Selesai	173.000.000	23	Selesai	173.000.000	23	Selesai	173.000.000	23	Selesai	873.000.000																					
1.01.027.02.33	Pangaldan Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	Jumlah Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	26	Selesai	473.000.000	26	Selesai	473.000.000	26	Selesai	473.000.000	26	Selesai	473.000.000	26	Selesai	473.000.000	26	Selesai	473.000.000	150	Selesai	2.573.000.000																					
1.01.027.02.34	Pangaldan Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	Jumlah Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln																																										
1.01.027.02.35	Pangaldan Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	Jumlah Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	2	Ergulae	34.840.000	2	Ergulae	34.840.000	2	Ergulae	60.550.900	2	Ergulae	66.565.960	2	Ergulae	75.000.029,00	2	Ergulae	80.500.029,00	10	Ergulae	554.840.513																					
1.01.027.02.36	Pangaldan Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	Jumlah Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	3	Ergulae	173.000.000	3	Ergulae	173.000.000	3	Ergulae	173.000.000	3	Ergulae	173.000.000	3	Ergulae	173.000.000	3	Ergulae	173.000.000	23	Ergulae	873.000.000																					
1.01.027.02.37	Pangaldan Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	Jumlah Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	1	Agli Lasa	73.000.000	1	Agli Lasa	73.000.000	1	Agli Lasa	73.000.000	1	Agli Lasa	73.000.000	1	Agli Lasa	73.000.000	1	Agli Lasa	73.000.000	1	Agli Lasa	73.000.000																					
1.01.027.02.38	Pangaldan Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	Jumlah Mabr Pratik dan Pangaldan Dlln	1	Ergulae	23.000.000	1	Ergulae	23.000.000	2	Ergulae	73.000.000	1	Ergulae	23.000.000	1	Ergulae	23.000.000	2	Ergulae	73.000.000	6	Ergulae	223.000.000																					







## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada pembahasn ini akan disajikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.21**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

<b>Visi : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA</b>									
<b>Misi Ke-3 : "Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan"</b>									
<b>Tujuan Menigkatnya Indeks Pendidikan</b>									
<b>INDIKATOR SASARAN</b>		<b>Kondisi Awal RPJMD</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Kondisi Akhir RPJMD</b>
1	Angka rata-rata lama sekolah	7,55	7,82	8,09	8,36	8,63	8,9	9,17	9,17
	angka Harapan lama sekolah	12,46	12,59	12,72	12,85	12,98	13,11	13,24	13,24
<b>Misi Ke-5 : "Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif"</b>									
<b>Tujuan Menigkatnya Pelestarian Budaya Asli Balangan</b>									
<b>INDIKATOR SASARAN</b>		<b>Kondisi Awal RPJMD</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Kondisi Akhir RPJMD</b>
2	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	48	52	58	68	81	87	100	100

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan 2021-2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan. Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu :

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Balangan untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun yang tersirat di dalam visi dan misi yang telah di sepakati bersama.
2. Adanya komitmen seluruh jajaran pendidikan untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif.
4. Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan mobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, mudah mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis atau RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RJPMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan. Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Balangan dan OPD serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja OPD. Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja lima tahunan dalam pembangunan pendidikan.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Balangan 2021-2026 tetap memperhatikan dinamika penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan diberlakukan secara nasional atau dipandang strategis dalam lingkup regional maka dimungkinkan dilakukan perubahan atau revisi RENSTRA sesuai kebutuhan organisasi.

Efektifitas RENSTRA ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan bidang pendidikan

untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan khususnya dan tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel T.C.27  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan  
Kabupaten Balangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
Meningkatnya Indeks Pendidikan	Meningkatkan Akses dan Penerimaan Pendidikan	1.01.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,54		64,44		71,60		72		72,50		73		73		247.587.282.825							
					Nilai	5.564.424.226,10	Nilai	213.346.988.695	Nilai	263.891.752.998	Nilai	289.939.219.152	Nilai	315.119.666.697	Nilai	346.631.633.424	Nilai	347.587.282.825								
Meningkatkan Mutu Pendidikan		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	%	407.900.000	100	%	510.088.000	100	%	604.971.000	100	%	321.132.700	100	%	383.245.970	100	%	388.579.587	100	%	164.345.225
					1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	341.100.000	6	dokumen	224.144.000	4	dokumen	121.767.200	5	dokumen	69.235.000	5	dokumen	76.159.500	5	dokumen	83.774.550	30
		1.01.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	dokumen	66.800.000	7	Laporan	265.944.000	7	Laporan	483.203.800	12	Laporan	251.897.700	2	dokumen	277.087.470	2	dokumen	304.795.217	35	dokumen	1.669.729.187	
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	%	1.032.200.000,00	100	%	199.028.826.139	100	%	228.217.079.094	100	%	273.296.366.982	100	%	300.625.982.207	100	%	330.688.091.428	100	%	241.041.863.827
		1.01.01.2.02.01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asli	12	bulan	164.607.038.070	12	bulan	197.601.569.739	12	bulan	222.000.649.606	2500	orang	270.305.229.952	2500	orang	297.335.752.507	2500	orang	327.069.327.718	7030	bulan	1.314.312.519.162	
		1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengisian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengisian Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	1.032.200.000	3	dokumen	1.425.266.400	10	dokumen	3.216.425.430	3	dokumen	2.991.127.000	5	dokumen	3.200.230.700	6	dokumen	3.619.263.670	31	bulan	15.574.522.170	
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Baik	100	%		100	%	813.000.000	100	%	1.977.175.000	100	%	1.628.834.200	100	%	1.240.755.000	100	%	1.240.755.000				
		1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Substansi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						6	dokumen	144.320.000	6	dokumen	305.916.800	6	dokumen	144.320.000	6	dokumen	144.320.000	24		738.906.800		
		1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			2	Laporan	813.000.000	1	Laporan	789.800.000			2	Laporan	790.980.000	2	Laporan	790.980.000	7		3.194.760.000			
		1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			9	Laporan	1.043.045.000	9	Laporan	1.320.917.400	8	Laporan	305.445.000	8	Laporan	305.445.000	34		2.074.862.400					
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	%	1.524.900.000	100	%	5.759.190.000	100	%	15.443.596.000	100	%	6.555.883.000	100	%	7.211.141.850	100	%	7.932.256.035	100	%	354.751.430
		1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Keengkapannya	2	Paket	64.400.000	2	Paket	107.100.000	405	Paket	360.898.500	500	Paket	144.533.000	500	Paket	159.986.650	500	Paket	174.865.535	1900	hr	910.604.385	
		1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-undangan	803	Orang	1.460.500.000	3028	Orang	5.652.000.000	1065	Orang	15.182.668.000	1731	Orang	6.411.050.000	3028	Orang	7.052.155.000	3028	Orang	7.757.370.500	13663	bulan	43.515.863.560	
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	%	1.192.291.940	100	%	3.856.186.800	100	%	6.754.734.000	100	%	4.273.123.800	100	%	4.700.435.960	100	%	5.170.479.586	100	%	2.169.494.724
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	paket	48.761.700	23	paket	50.515.000	50	paket	69.093.200	20	paket	66.254.300	30	paket	72.879.730	30	paket	80.167.703	179	paket	387.671.633	
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	140.900.000	15	paket	1.060.800.000	10	paket	1.831.997.400	20	paket	57.633.700	5	paket	63.397.070	6	paket	69.736.777	68	paket	3.223.984.947	
		1.01.01.2.06.03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	paket	8.434.000	25	paket	423.344.000	8	paket	31.891.700	10	paket	24.999.400	10	paket	27.499.340	10	paket	30.249.274	68	paket	546.327.714	
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	paket kegiatan	267.609.500	27	Paket	479.987.800	25	Paket	544.922.500	20	paket	458.180.200	4	paket kegiatan	503.998.220	4	paket kegiatan	554.398.042	67	paket kegiatan	2.808.676.262	
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	440	dokumen	26.960.000	441	dokumen	35.280.000	4	dokumen	974.383.200	4	dokumen	50.976.000	4	dokumen	56.073.600	4	dokumen	61.680.980	807	bulan	1.205.373.760	
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	dokumen	610.506.740	11	Laporan	1.800.260.000	4	Laporan	3.302.956.000	7	Laporan	3.615.080.000	10	Laporan	3.076.588.000	10	Laporan	4.374.246.800	52	bulan	17.679.637.549	
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	%	252.600.000	100	%	648.500.000	100	%	10.287.661.300	100	%	-	100	%	816.500.000	100	%	900.350.000	100	%	889.979.639
		1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	unit	106.000.000	27	unit	648.500.000	272	unit	10.059.120.000	-	16	unit	648.500.000	16	unit	713.350.000	334	unit	12.174.470.000			
		1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	paket	-	0	paket	-	40	Unit	228.541.300	-	2	paket	25.000.000	2	paket	27.500.000	44	paket	261.041.300			

1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	paket	147.600.000	0	paket	0	paket	-	-	-	-	2	paket	145.000.000	2	paket	159.500.000	6	paket	492.100.000				
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	%	478.160.500	100	%	1.236.694.700	100	%	963.625.800	100	%	873.854.300	100	%	961.240.390	100	%	1.087.364.420	100	%	1.377.980.475		
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	4.250.000	3	Laporan	273.695.700	2	Laporan	230.240.600	2	Laporan	214.307.400	3	Laporan	235.738.140	3	Laporan	259.311.954	14	bulan	1.217.543.794			
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibebani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibebani	5	Laporan	473.910.500	4	Laporan	962.599.000	4	Laporan	733.985.200	4	Laporan	689.547.500	4	Laporan	725.932.250	4	Laporan	798.952.475	25	bulan	4.353.996.925			
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik	100	100	%	766.371.711,10	100	%	1.602.102.966	100	%	2.602.713.990	100	%	2.292.333.700	100	%	421.610.970	100	%	463.772.007	100	%	1.682.533.245		
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30	LHE																						
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	LHE	240.900.000	45	LHE	206.430.000	30	LHE	675.710.350															
1.01.01.2.09.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	LHE	200.455.000	13	LHE	442.246.500	13	LHE	279.847.700	13	LHE	289.771.500	13	LHE	318.748.650	13	LHE	300.623.515	70	bulan	1.881.684.865			
1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	33	LHE	134.889.250	33	LHE	325.664.500	33	LHE	77.887.300	33	LHE	93.511.200	33	LHE	102.862.300	33	LHE	113.148.502	198	bulan	847.763.122			
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	LHE	190.727.461,10	6	LHE	527.759.994				8	LHE	1.879.462.500	2	LHE	2.067.408.750	2	LHE	2.274.149.625	20	peking	6.939.508.302			
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Perukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						3	LHE	1.569.268.640				3	LHE	200.000.000	3	LHE	200.000.000	4				1.969.268.640		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		69,96			70		70,27		75,87		77,87		79,87		79,87		79,87		79,87						
		APK PAUD																								
		APK SD/ sederajat						98,35		98,78		99,52		99,79		99,79		99,79		99,79						
		APM SD/ sederajat				90,42		90,94		91,25		92,35		93,45		93,45		93,45		93,45						
		APK SMP/ sederajat				79,97		80,28		82,12		83,24		84,38		84,38		84,38		84,38						
		APM SMP/ sederajat				64,88		65,13		66,08		67,13		68,08		68,08		68,08		68,08						
		Angka melanjutkan SD ke SMP				75,75		76,48		79,09		79,77		80,67		80,67		80,67		80,67						
		Angka melanjutkan SMP ke SMA				97,85		98,46		98,75		99,01		99,27		99,27		99,27		99,27						
		Persentase ketersediaan kelompok belajar pada PKBM Kecamatan						100		100		100		100		100		100		100						
		Nilai rata-rata literasi SD				55,57		65,00		68,67		69,61		70,56		70,56		70,56		70,56						
		Nilai Rata-rata literasi SMP				52,25		61,88		62,01		62,95		63,90		63,90		63,90		63,90						
		Nilai rata-rata numerasi SD				34,55		51,55		51,75		52,51		53,28		53,28		53,28		53,28						
		Nilai Rata-rata Numerasi SMP				40,88		45,92		41,83		43,76		45,69		45,69		45,69		45,69						
		Indeks iklim keamanan SD				65,98		68,75		71,72		75,51		79,36		79,36		79,36		79,36						
		Indeks iklim keamanan SMP				60		60,1		68,95		70,06		71,17		71,17		71,17		71,17						
		Indeks iklim ketahanan SD				60,65		69,35		70,68		73,19		75,7		75,7		75,7		75,7						
		Indeks iklim ketahanan SMP				61,78		66,67		70,35		72,86		75,37		75,37		75,37		75,37						
		Indeks iklim inklusivitas SD				62,75		68,78		69,14		62,96		66,78		66,78		66,78		66,78						
		Indeks iklim inklusivitas SMP				62,68		65,78		66,79		69,48		62,17		62,17		62,17		62,17						





1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang UHT Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang UHT Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	sekolah	-	0	sekolah	-	1	Ruang	306.304.000	4	ruang	671.870.000	1	sekolah	320.350.000.00	1	sekolah	344.300.000.00	7	sekolah	1.642.824.000
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang terenuhi Perpustakaan Sekolah	2	sekolah	540.330.550	2	sekolah	-	0	sekolah	-	-	-	2	sekolah	540.330.550	2	sekolah	540.330.550	8	sekolah	1.647.991.650	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	sekolah	933.272.150	1	sekolah	-	1	Ruang	706.564.000	1	ruang	39.000.000	1	sekolah	357.500.000	1	sekolah	357.500.000	6	sekolah	2.393.826.150
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	0	sekolah	-	0	sekolah	-	0	sekolah	-	-	-	2	sekolah	611.000.000	2	sekolah	611.000.000	4	sekolah	1.222.000.000	
1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Pekar	Jumlah Pembangunan Fasilitas Pekar	0	sekolah	-	0	sekolah	-	0	sekolah	-	-	-	1	sekolah	311.350.000.00	1	sekolah	335.300.000.00	2	sekolah	646.650.000	
1.01.02.2.02.11	Pembangunan Karlin Sekolah	Jumlah Pembangunan Karlin Sekolah	0	sekolah	-	0	sekolah	-	0	sekolah	-	-	-	3	sekolah	317.000.000	3	sekolah	336.550.000	6	sekolah	654.050.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	sekolah	720.000.000	4	sekolah	-	9	Lte	1.885.940.000	7	unit	4.455.300.000	4	sekolah	1.284.400.000	4	sekolah	1.383.200.000	32	sekolah	9.727.940.000
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhabilitasi	0	sekolah	-	0	sekolah	-	0	sekolah	-	-	-	2	sekolah	491.400.000	2	sekolah	529.200.000	4	sekolah	1.020.600.000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	ruang	1.462.249.550	4	ruang	757.113.000	0	sekolah	-	8	ruang	1.527.700.000	3	sekolah	963.300.000	3	sekolah	1.037.400.000	25	sekolah	5.747.762.550
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang direhabilitasi	3	ruang	588.503.250	3	ruang	607.050.000	0	sekolah	-	-	-	2	sekolah	156.000.000	2	sekolah	168.000.000	10	sekolah	1.519.553.250	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UHT Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang UHT Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	141.473.000	1	ruang	106.545.000	0	sekolah	-	3	ruang	468.120.000	2	sekolah	390.000.000	2	sekolah	420.000.000	10	sekolah	1.526.138.000
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	ruang	424.419.000	1	ruang	210.000.000	0	sekolah	-	4	ruang	681.160.000	1	sekolah	245.700.000	1	sekolah	264.600.000	10	sekolah	1.825.879.000
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	ruang	551.811.250	2	ruang	443.400.000	0	sekolah	-	4	ruang	480.980.000	1	sekolah	537.000.000	1	sekolah	559.000.000	11	sekolah	2.572.091.250
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhabilitasi	0	sekolah	-	0	sekolah	-	0	sekolah	-	-	-	1	sekolah	175.000.000	1	sekolah	175.000.000	2	sekolah	350.000.000	
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Petugas Sekolah yang direhabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Petugas Sekolah yang direhabilitasi	0	sekolah	-	0	sekolah	-	0	sekolah	-	-	-	1	sekolah	214.500.000	1	sekolah	231.000.000	2	sekolah	445.500.000	
1.01.02.2.02.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Pekar yang direhabilitasi	Jumlah Fasilitas Pekar yang direhabilitasi	0	sekolah	-	0	sekolah	-	0	sekolah	-	-	-	2	sekolah	197.600.000	2	sekolah	212.800.000	4	sekolah	410.400.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	sekolah	1.100.960.500	10	sekolah	1.665.700.000	0	sekolah	-	7	unit	1.710.620.000	4	sekolah	685.000.000	4	sekolah	630.000.000	32	sekolah	5.712.470.500
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0	sekolah	-	0	sekolah	-	0	sekolah	-	6	paket	2.228.174.400	2	sekolah	455.000.000	2	sekolah	490.000.000	10	sekolah	3.173.174.400
1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah peralatan rumah tangga sekolah yang diperoleh	10	unit	150.000.000	0	unit	-	0	unit	-	-	-	10	unit	150.000.000	10	unit	150.000.000	30	sekolah	450.000.000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0	sekolah	-	0	sekolah	-	1252	Paket	3.277.320.000	2	paket	6.853.176.800	4	sekolah	780.000.000	4	sekolah	840.000.000	1.292	sekolah	11.750.496.800
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	0	siswa	-	0	siswa	-	0	siswa	-	0	-	2000	siswa	75.000.000	2000	siswa	75.000.000	4.000	siswa	150.000.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menikmati Biaya Personil Peserta Didik	681	Peserta Didik	6.600.760.000	673	Peserta Didik	5.919.500.000	1418	Peserta Didik	1.443.000.000	735	peserta didik	637.520.000	750	org	860.000.000	750	org	850.000.000	5.004	org	15.900.770.000
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktis dan Peraga Siswa yang Tersedia	2	Paket	437.500.000	2	Paket	321.310.000	0	sekolah	-	2038	paket	2.038.000.000	3	sekolah	437.500.000	3	sekolah	437.500.000	2.043	sekolah	3.641.910.000
1.01.02.2.02.36	Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	2340	Peserta Didik	242.380.000	2337	Peserta Didik	158.510.000	2400	Peserta Didik	221.150.000	-	2400	peserta Didik	250.000.000	2400	Peserta Didik	250.000.000	11.877	Kegiatan	1.122.040.000		
1.01.02.2.02.37	Penyediaan Tenaga Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	25	sekolah	108.570.000	25	sekolah	24.400.000	26	sekolah	101.060.000	-	25	sekolah	175.000.000	25	sekolah	175.000.000	126	sekolah	584.050.000		
1.01.02.2.02.38	Pembiayaan Mutu Bakat dan Kecerdasan Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi Lomba Akademik dan Non Akademik	400	Peserta Didik	198.728.000	500	Peserta Didik	339.392.000	515	Peserta Didik	456.068.000	2366	Peserta Didik	551.432.000	515	peserta Didik	475.000.000	515	Peserta Didik	475.000.000	4.811	sekolah	2.895.620.000
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						636	Orang	8.022.000.000	593	Orang	8.520.850.000	640	Orang	5.600.300.000	645	Orang	5.600.300.000	2.514		28.143.450.000	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK yang mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan karir	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	-	-	2	Kegiatan	73.000.028.00	2	Kegiatan	80.300.028.00	4	Kegiatan	153.300.056	
1.01.02.2.02.41	Pembiayaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Diabiskan Pembiayaan	26	Kegiatan	2.207.450.000	26	sekolah	5.947.400.000	26	tan Pendidik	69.593.000	26	Satuan Pendidikan	333.820.000	26	tan Pendidik	175.000.000	26	tan Pendidik	175.000.000	156	Kegiatan	8.008.263.000
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	0	Aplikasi	3.388.693.244	26	sekolah	2.979.980.000	26	tan Pendidik	2.889.600.000	26	Satuan Pendidikan	4.334.850.000	26	tan Pendidik	4.334.850.000	130	Aplikasi	17.927.073.244			

1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		0	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		-	1	Kegiatan	25.000.000	2	Kegiatan	75.000.000	3	Kegiatan	100.000.000				
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Seling/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang dirubah		1	ruang	176.278.750	2	ruang		0	ruang		-	2	ruang	362.667.500	2	ruang	362.667.500	7	ruang	881.363.750				
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											10	Dokumen	167.511.000	10	Dokumen	175.000.000	10	Dokumen	175.000.000	30	Dokumen	517.511.000		
1.01.02.2.02.56	Penyenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar											26	Satuan Pendidikan	244.385.000	26	Satuan Pendidikan	250.000.000	26	Satuan Pendidikan	250.000.000	78	Satuan Pendidikan	744.385.000		
1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah											1	Ruang	678.120.000	1	Ruang	700.000.000	1	Ruang	700.000.000	3	Ruang	2.078.120.000		
1.01.02.2.02.64	Rehabilitasi Seling/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Seling/Berat											3	Ruang	357.580.000	3	Ruang	500.000.000	3	Ruang	500.000.000	9	Ruang	1.357.580.000		
1.01.02.2.02.67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia											2	Paket	200.000.000	2	Paket	200.000.000	2	Paket	200.000.000	6	Paket	600.000.000		





1.01.02.2.04.48	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia								5	Paket	500.000.000	5	Paket	500.000.000	5	Paket	500.000.000	5	Paket	500.000.000	20	Paket	2.000.000.000							
1.01.02.2.04.49	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan											1	Lini	171.905.500	1	Lini	200.000.000	1	Lini	200.000.000	3	Lini	571.905.500							
1.01.02.2.04.50	Renovasi Bangun/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Bangun/Berat											1	Lini	200.000.000	1	Lini	200.000.000	1	Lini	200.000.000	3	Lini	600.000.000							
1.01.02.3.08	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Bantuan Fasilitas pendidikan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia											50	Satuan Pendidikan	30.000.000.000	50	Satuan Pendidikan	70.000.000.000	50	Satuan Pendidikan	100.000.000.000	150	Satuan Pendidikan	200.000.000.000							
1.01.02.3.08.02	Penyediaan Bantuan Pembiayaan bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia											50	Satuan Pendidikan	30.000.000.000	50	Satuan Pendidikan	70.000.000.000	50	Satuan Pendidikan	100.000.000.000	150	Satuan Pendidikan	200.000.000.000							
01.01-03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURKULUM	Nilai rata-rata literasi SD								55,57			68,00											70,56							
		Nilai Rata-rata Literasi SMP								52,25	%	174.862.000		61,88	%	115.990.000		62,95	%	191.000.000		63,9	%	191.000.000		63,9					
		Nilai rata-rata numerasi SD								24,55				51,95											53,28						
		Nilai Rata-rata Numerasi SMP								40,98				43,92											45,69						
1.01.03.2.01	Pengadaan Kurikulum Mutan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah yang mengadopsi Buku Teks dan Alat Peraga Inovasi							100	%	174.862.000	100	%	115.990.000	100	%	502.308.600	100	%	191.000.000	100	%	191.000.000	500	%	492.812.000					
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Mutan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Mutan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun							1	Dokumen	3.740.000	1	Dokumen	3.930.000			2	Dokumen	3.740.000	2	Dokumen	3.740.000	6	Dokumen	15.150.000						
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Mutan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Silabus Mutan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun							1	Dokumen	3.740.000	1	Dokumen	3.930.000			2	Dokumen	3.740.000	2	Dokumen	3.740.000	6	Dokumen	15.150.000						
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Mutan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Mutan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia							500	Buku	50.000.000	500	Buku	28.400.000			500	Buku	28.400.000	500	Buku	28.400.000	2.000	Buku	135.200.000						
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Mutan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Mutan Lokal Pendidikan Dasar yang Mengingat Kompetensinya							100	org/Kegiatan	117.382.000	18	Orang	79.690.000			100	org/Kegiatan	65.120.000	100	org/Kegiatan	65.120.000	318	org/Kegiatan	327.312.000						
1.01.03.2.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Mutan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Mutan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun											10	Dokumen	502.308.600	10	Dokumen	502.308.600	10	Dokumen	502.308.600	30	Dokumen	1.506.925.800							
1.01.04.2	PROGRAM PENDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten								0			58											70							
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompeten								13			19,41											26,41							
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								100	100	%	1.807.904.000	100	%	8.843.030.000	100	%	5.720.912.900	100	%	300.000.000	100	%	360.000.000	100	%	17.098.446.900			
1.01.04.2.01.01	Pertimbangan dan Pemetaan Pendik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Pertimbangan dan Pemetaan Pendik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							600	Pk	4	dokumen	52.000.000	15	dokumen	1.350.204.000	6	dokumen	Rp 8.558.500.000	6	dokumen	Rp 4.481.240.200	6	dokumen	Rp 140.000.000	6	dokumen	Rp 180.000.000	43	dokumen	14.761.954.200
1.01.04.2.01.02	Pemetaan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemetaan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							40	Pk	3	Laporan	15.000.000	8	Laporan	457.700.000	9	Laporan	Rp 284.480.000	9	Laporan	Rp 1.239.272.700	9	Laporan	Rp 160.000.000	9	Laporan	Rp 180.000.000	47	Laporan	2.336.452.700
1.01.05.2	PROGRAM PENGENDALIAN PERZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Disupdate Purnizinannya								100	100	%	205.000.000	100	%	205.000.000	100	%	73.920.000	100	%	258.320.000	100	%	258.000.000	100	%	910.000.000			
1.01.05.2.02	Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								%	205.000.000	%	205.000.000	100	%	73.920.000	100	%	258.320.000	100	%	250.000.000	100	%	250.000.000	100	%	910.000.000			
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Pemetaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pemetaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								6	Dokumen	73.020.000	31	Dokumen	258.320.000	31	Dokumen	258.320.000	31	Dokumen	258.320.000	31	Dokumen	258.320.000	31	Dokumen	258.320.000				
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							41	dokumen	205.000.000	41	Dokumen	205.000.000	0	Lembaga				41	Dokumen	250.000.000	41	Dokumen	250.000.000	164	Lembaga	910.000.000			



**Tabel T-C.27 (Sebelum Penyesuaian RENSTRA)  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan  
Kabupaten Balangan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
						7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya Indeks Pendidikan	1.01.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan pelayanan publik urusan pemerintah daerah	100	100	%	5.564.424.220,10	100	%	213.346.588.605	100	%	292.338.266.019	100	%	319.259.522.811	100	%	351.833.975.091	100	%	387.017.372.644	100	%	247.587.282.525		
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	100	100	%	407.900.000	100	%	510.088.000	100	%	451.833.200	100	%	497.016.520	100	%	546.718.172	100	%	601.389.989	100	%	164.345.225		
		1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		5	dokumen	341.100.000	6	dokumen	224.144.000	2	dokumen	109.167.200	5	dokumen	120.083.920	5	dokumen	132.092.312	5	dokumen	145.301.543	28	dokumen	1.071.888.975		
		1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah		5	dokumen	66.800.000	7	Laporan	285.944.000	5	Laporan	342.666.000	2	dokumen	376.932.600	2	dokumen	414.625.860	2	dokumen	456.088.446	23	dokumen	1.943.056.906		
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	%	1.032.200.000,00	100	%	199.026.826.139	100	%	267.007.168.069	100	%	293.707.884.876	100	%	323.078.673.363	100	%	355.386.540.700	100	%	241.041.863.027		
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pelaksanaan pembayaran sejumlah gaji dan tunjangan ASN		12	bulan	164.607.038,070	12	bulan	197.601.559.739	12	bulan	264.113.342.669	12	bulan	290.524.676.936	12	bulan	319.577.144.629	12	bulan	351.534.859.092	72	bulan	1.423.351.583.066		
		1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	pelaksanaan pembayaran Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4	dokumen	1.032.200.000	3	dokumen	1.425.266.400	2	dokumen	2.893.825.400	4	dokumen	3.183.207.940	5	dokumen	3.501.528.734	6	dokumen	3.851.681.607	24	bulan	15.887.710.081		
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								813.000.000			1.900.755.000			1.240.755.000			1.240.755.000			1.240.755.000					
		1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									6	dokumen	144.330.000	6		144.330.000	6		144.330.000	6		144.330.000	24		577.320.000		
		1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						2	Laporan	813.000.000	2	Laporan	790.980.000	2		790.980.000	2		790.980.000	2		790.980.000	10		3.976.920.000		
		1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									8	Laporan	965.445.000	8		305.445.000	8		305.445.000	8		305.445.000	32		1.881.780.000		
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	%	1.524.900.060	100	%	5.759.190.000	100	%	17.941.938.000	100	%	19.736.131.800	100	%	21.709.744.980	100	%	23.860.719.478	100	%	354.751.430		
		1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut bagi ASN SKPD		1	Paket	64.400.000	3	Paket	107.100.000	1	Paket	116.640.000	1	Paket	128.304.000	2	Paket	141.134.400	3	Paket	155.247.840	11	lir	712.826.240		
		1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-Undangan		853	Orang	1.460.500.060	3028	Orang	5.652.090.000	2637	Orang	17.825.298.000	3028	Orang	19.607.827.800	3028	Orang	21.568.610.580	3028	Orang	23.725.471.638	15602	bulan	89.839.798.078		
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	%	1.102.291.949	100	%	3.850.186.800	100	%	2.959.036.000	100	%	3.254.939.600	100	%	3.580.433.560	100	%	3.938.476.916	100	%	2.169.494.724		
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2	paket	48.761.700	2	paket	50.515.000	1	paket	66.305.800	2	paket	72.936.380	3	paket	80.230.018	4	paket	88.253.020	14	paket	407.001.918		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
						7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	paket	140.000.000	12	paket	1.060.800.000	5	paket	174.045.600	5	paket	191.450.160	5	paket	210.595.176	6	paket	231.654.694	5	paket	2.008.545.630		
		1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan Peralatan Rumah Tangga		2	paket	8.434.000	19	paket	423.344.000	4	paket	20.932.300	10	paket	23.025.530	10	paket	25.328.083	10	paket	27.860.891	55	paket	528.924.804		
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan		3	paket kegiatan	267.609.500	5	Paket	479.987.800	6	Paket	454.303.300	4	paket kegiatan	499.733.630	4	paket kegiatan	549.706.993	4	paket kegiatan	604.677.692	26	paket kegiatan	2.856.018.915		
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		400	dokumen	26.980.000	441	dokumen	35.280.000	437	dokumen	976.452.000	400	dokumen	1.074.097.200	400	dokumen	1.181.506.920	400	dokumen	1.299.657.612	2478	bulan	4.593.973.732		
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10	dokumen	610.506.749	11	Laporan	1.800.260.000	4	Laporan	1.266.997.000	10	Laporan	1.393.696.700	10	Laporan	1.533.066.370	10	Laporan	1.686.373.007	55	bulan	8.290.899.826		
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	%	252.600.000	100	%	648.500.000	100	%	53.922.000	100	%	59.314.200	100	%	713.745.620	100	%	785.120.182	100	%	889.979.539		
		1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3	unit	105.000.000	27	unit	648.500.000	0	unit	-	0	unit	-	16	unit	648.500.000	16	unit	713.350.000	62	unit	2.115.350.000		
		1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah ketersediaan mebel kantor		0	paket	-	0	paket	-	40	Unit	53.922.000	2	paket	59.314.200	2	paket	65.245.620	2	paket	71.770.182	46	paket	194.532.039		
		1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2	paket	147.600.000	0	paket	-	0	paket	-	2	paket	-	2	paket	-	2	paket	-	2	paket	80.525.500		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	%	478.160.500	100	%	1.236.694.700	100	%	872.508.800	100	%	959.759.680	100	%	1.055.735.648	100	%	1.161.309.213	100	%	1.377.580.475		
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan ketersediaan jasa surat menyurat		1	Laporan	4.250.000	3	Laporan	273.695.700	2	Laporan	213.451.800	3	Laporan	234.796.980	3	Laporan	258.276.678	3	Laporan	284.104.346	15	bulan	1.268.575.504		
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5	Laporan	473.910.500	4	Laporan	962.999.000	4	Laporan	659.057.000	4	Laporan	724.962.700	4	Laporan	797.458.970	4	Laporan	877.204.867	25	bulan	4.495.593.037		
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	%	766.371.711,10	100	%	1.502.102.966	100	%	1.151.104.950	100	%	1.021.450.595	100	%	1.123.595.655	100	%	1.235.955.220	100	%	1.582.533.245		
		1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		27	Unit	240.500.000	43	Unit	206.430.000	30	Unit	550.513.550	30	Unit	605.564.905	30	Unit	666.121.396	30	Unit	732.733.535	190	bulan	3.001.863.386		
		1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan		13	Unit	200.455.000	13	Unit	442.248.500	13	Unit	300.148.200	13	Unit	330.163.020	13	Unit	363.179.322	13	Unit	399.497.254	78	bulan	2.035.691.296		
		1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan		33	Unit	134.689.250	33	Unit	325.664.500	33	Unit	77.929.700	33	Unit	85.722.670	33	Unit	94.294.937	33	Unit	103.724.431	198	bulan	822.025.488		
		1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		2	Unit	190.727.461,10	6	Unit	527.759.966				2	gedung	-	2	gedung	-	2	gedung	-	2	gedung	718.487.427		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
						7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah raport k 13 SD yang sedikan		3900	eksemplar	315.325.000	2000	unit	101.400.000	0	eksemplar	-	4137,51	eksemplar	208.360.760,00	4262	eksemplar	214.611.582,80	4389	eksemplar	221.049.930,28	18.689	eksemplar	1.060.747.273		
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa SD yang mendapatkan bantuan biaya sekolah/beasiswa		613	Orang	329.500.000	1113	Orang	581.500.000	0	Orang	-	648	Orang	324.000.000,00	648	Orang	324.000.000,00	648	Orang	324.000.000,00	3.670	Orang	1.883.000.000		
		1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang terpenuhi APE		2	Paket	1.380.600.000	4	Paket	7.661.600.000	0	Paket	-	2	Paket	1.000.000.000	2	Paket	1.000.000.000	2	Paket	1.000.000.000	12	Paket	12.042.200.000		
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang mendapatkan kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		176	sekolah	307.440.000	176	sekolah	395.350.000	176	sekolah	470.400.000	176	sekolah	44.840.000,00	176	sekolah	44.840.000,00	176	sekolah	44.840.000,00	1.056	sekolah	1.307.710.000		
		1.01.02.2.01.24	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan kegiatan pelatihan EDS dan akreditasi sekolah		0	sekolah	-	176	sekolah	694.300.000	176	sekolah	145.420.000	176	sekolah	89.680.000,00	176	sekolah	89.680.000,00	176	sekolah	89.680.000,00	880	sekolah	1.108.760.000		
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan lomba tingkat Provinsi dan Nasional		156	siswa	79.300.000	427	siswa	559.764.600	400	siswa	626.336.900	200	siswa	200.000.000	200	siswa	200.000.000	200	siswa	200.000.000	1.583	siswa	1.865.401.500		
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								1310	Orang	14.668.600.000	1310	Orang	13.168.350.000	1320	Orang	13.168.350.000	1330	Orang	13.168.350.000	5.270		54.173.650.000		
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD yang mendapatkan pelatihan pengembangan karir		2	Kegiatan	187.680.000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	2	Kegiatan	66.363.660,00	2	Kegiatan	73.000.026,00	2	Kegiatan	80.300.028,60	10	Kegiatan	219.663.715		
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pelatihan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah		175	Sekolah	5.750.750.000	175	Sekolah	12.652.398.800	176	Sekolah	132.703.000	175	Sekolah	71.000.000	175	Sekolah	71.000.000	175	Sekolah	71.000.000	1.051	Sekolah	18.748.851.800		
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang tertib pengelolaan Dana BOS		0	sekolah	-	175	sekolah	13.266.363.869	176	sekolah	13.266.363.869	177	sekolah	10.727.019.307,00	177	sekolah	10.727.019.307,00	178	sekolah	10.755.219.307,00	883	Sekolah	58.741.985.659		
		1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									50	Orang	200.360.000	55	Orang	200.360.000	60	Orang	200.360.000	70	Orang	200.360.000	235		801.440.000		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	72,86	74,56	%	16.907.878.350	74,56	%	19.659.013.244	76,26	%	14.459.426.244	77,96	%	21.542.494.210	79,66	%	22.175.780.576	81,36	%	22.812.730.579	83,06	%	113.776.059.403		
		1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah gedung untuk unit sekolah yang dibangun				5	unit	1.050.000.000	0	gedung	-	1	gedung	200.000.000	1	gedung	200.000.000	1	gedung	200.000.000	8	gedung	1.650.000.000			
		1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun		1	kelas	500.691.100	0	kelas	-	3	kelas	750.000.000	1	kelas	287.400.000,00	3	kelas	311.350.000,00	4	kelas	335.300.000,00	12	kelas	2.184.741.100		
		1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		1	sekolah	-	1	sekolah	-	0	sekolah	-	1	sekolah	287.400.000,00	1	sekolah	311.350.000,00	1	sekolah	335.300.000,00	5	Sekolah	934.050.000		
		1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		1	sekolah	-	1	sekolah	-	0	sekolah	-	1	sekolah	296.400.000	1	sekolah	320.350.000,00	1	sekolah	344.300.000,00	5	Sekolah	961.050.000		
		1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang terpenuhi Perpustakaan Sekolah		2	sekolah	549.330.550	2	sekolah	-	0	sekolah	-	2	sekolah	549.330.550	2	sekolah	549.330.550	2	sekolah	549.330.550	2	sekolah	549.330.550		
		1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium SMP		1	sekolah	933.272.150	1	sekolah	-	0	sekolah	-	1	sekolah	357.500.000	1	sekolah	357.500.000	1	sekolah	357.500.000	2	Sekolah	1.072.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
						7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		2	sekolah	-	2	sekolah	-	0	sekolah	-	2	sekolah	564.000.000	2	sekolah	611.000.000	2	sekolah	611.000.000	10	Sekolah	1.786.000.000		
		1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Pembangunan Fasilitas Parkir		1	sekolah	-	1	sekolah	-	0	sekolah	-	1	sekolah	287.400.000,00	1	sekolah	311.350.000,00	1	sekolah	335.300.000,00	5	Sekolah	934.050.000		
		1.01.02.2.02.11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Pembangunan Kantin Sekolah		4	sekolah	-	4	sekolah	-	0	sekolah	-	3	sekolah	298.450.000	3	sekolah	317.500.000	3	sekolah	336.550.000	17	Sekolah	952.500.000		
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		4	sekolah	720.000.000	4	sekolah	-	3	Paket	1.662.180.000	4	sekolah	1.185.600.000	4	sekolah	1.284.400.000	4	sekolah	1.383.200.000	23	Sekolah	6.235.380.000		
		1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhabilitasi		2	sekolah	-	2	sekolah	-	0	sekolah	-	2	sekolah	453.600.000	2	sekolah	491.400.000	2	sekolah	529.200.000	10	Sekolah	1.474.200.000		
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhab		7	ruang	1.462.249.550	4	ruang	757.113.000	0	sekolah	-	3	sekolah	889.200.000	3	sekolah	963.300.000	3	sekolah	1.037.400.000	20	Sekolah	5.109.262.550		
		1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang direhab		3	ruang	588.503.250	3	ruang	607.050.000	0	sekolah	-	2	sekolah	144.000.000	2	sekolah	156.000.000	2	sekolah	168.000.000	12	Sekolah	1.663.553.250		
		1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab		2	ruang	141.473.000	1	ruang	106.545.000	0	sekolah	-	2	sekolah	360.000.000	2	sekolah	390.000.000	2	sekolah	420.000.000	9	Sekolah	1.418.018.000		
		1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab		3	ruang	424.419.000	1	ruang	210.000.000	0	sekolah	-	1	sekolah	226.800.000	1	sekolah	245.700.000	1	sekolah	264.600.000	7	Sekolah	1.371.519.000		
		1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhab		3	ruang	551.611.250	2	ruang	443.400.000	0	sekolah	-	2	sekolah	516.000.000	1	sekolah	537.500.000	1	sekolah	559.000.000	9	Sekolah	2.607.511.250		
		1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula yang direhab	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhab		1	sekolah	-	1	sekolah	-	0	sekolah	-	1	sekolah	175.000.000	1	sekolah	175.000.000	1	sekolah	175.000.000	5	Sekolah	525.000.000		
		1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab		1	sekolah	-	1	sekolah	-	0	sekolah	-	1	sekolah	198.000.000	1	sekolah	214.500.000	1	sekolah	231.000.000	5	Sekolah	643.500.000		
		1.01.02.2.02.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang direhab		2	sekolah	-	2	sekolah	-	0	sekolah	-	2	sekolah	182.400.000	2	sekolah	197.600.000	2	sekolah	212.800.000	10	Sekolah	592.800.000		
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab		7	sekolah	1.100.950.500	10	sekolah	1.685.700.000	0	sekolah	-	4	sekolah	540.000.000	4	sekolah	585.000.000	4	sekolah	630.000.000	29	Sekolah	4.541.650.500		
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah		2	sekolah	-	2	sekolah	-	0	sekolah	-	2	sekolah	420.000.000	2	sekolah	455.000.000	2	sekolah	490.000.000	10	Sekolah	1.365.000.000		
		1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah perlatan rumah tangga sekolah yang dipenuhi		10	unit	150.000.000	10	unit		0	unit	-	10	unit	150.000.000	10	unit	150.000.000	10	unit	150.000.000			450.000.000		
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah		4	sekolah	-	4	sekolah	-	0	sekolah	-	4	sekolah	720.000.000	4	sekolah	780.000.000	4	sekolah	840.000.000	20	Sekolah	2.340.000.000		
		1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa		2000	eks	-	2000	eks	-	0	eks	-	2000	eks	75.000.000	2000	eks	75.000.000	2000	eks	75.000.000	10000	eks	225.000.000		
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa SMP yang menerima bantuan beasiswa pendidikan		681	Peserta Didik	6.600.750.000	673	Peserta Didik	5.519.500.000	1415	org	1.443.000.000	750	org	850.000.000	750	org	850.000.000	750	org	850.000.000	5019	org	16.113.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
						7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang terpenuhi APE		2	Paket	427.500.000	2	Paket	321.310.000	0	sekolah	-	3	sekolah	427.500.000	3	sekolah	427.500.000	3	sekolah	427.500.000	13		2.031.310.000		
		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		2340	Peserta Didik	242.380.000	2337	Peserta Didik	158.510.000	2400	Peserta Didik	221.150.000	2400	Peserta Didik	250.000.000	2400	serta Didik	250.000.000	2400	eserta Didik	250.000.000	14277	Kegiatan	1.372.040.000		
		1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mendapatkan kegiatan pelatihan EDS dan akreditasi sekolah		25	Sekolah	108.570.000	25	Sekolah	24.400.000	25	Sekolah	101.540.000	25	Sekolah	175.000.000	25	Sekolah	175.000.000	25	Sekolah	175.000.000	150	Sekolah	759.510.000		
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan lomba tingkat Provinsi dan Nasional		400	Peserta Didik	198.728.000	500	Peserta Didik	339.392.000	515	Peserta Didik	456.070.000	515	Peserta Didik	475.000.000	515	serta Didik	475.000.000	515	eserta Didik	475.000.000	2960	Sekolah	2.419.190.000		
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									636	Orang	6.367.200.000	636	Orang	5.600.300.000	640	Orang	5.600.300.000	645	Orang	5.600.300.000	2557		23.168.100.000		
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK yang mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan karir		2	Kegiatan	-	2	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	2.06	Kegiatan	66.363.660,00	2	Kegiatan	73.000.026,00	2	Kegiatan	80.300.028,60	10	Kegiatan	219.663.715		
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah		26	Kegiatan	2.207.450.000	26	Sekolah	5.047.400.000	26	tuan Pendidik	69.593.000	26	tuan Pendidik	175.000.000	26	uan Pendidik	175.000.000	26	an Pendidik	175.000.000	156	Kegiatan	7.849.443.000		
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang tertib pengelolaan Dana BOS		0	Aplikasi untuk semua SMP		26	Sekolah	3.388.693.244	26	tuan Pendidik	3.388.693.244	26	tuan Pendidik	4.334.850.000	26	uan Pendidik	4.334.850.000	26	an Pendidik	4.334.850.000	130	Aplikasi	19.781.936.488		
		1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		1	Kegiatan		1	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan	25.000.000	1	Kegiatan	25.000.000	2	Kegiatan	75.000.000	6	Kegiatan	125.000.000		
		1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang direhab		1	ruang	176.278.750	2	ruang		0	ruang		2	ruang	352.557.500	2	ruang	352.557.500	2	ruang	352.557.500	2	ruang	352.557.500		
		<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD</b>	<b>66,55</b>	<b>67,65</b>	<b>%</b>	<b>5.711.755.000</b>	<b>67,65</b>	<b>%</b>	<b>17.481.989.600</b>	<b>68,75</b>	<b>%</b>	<b>24.709.330.200</b>	<b>69,85</b>	<b>%</b>	<b>51.750.232.000</b>	<b>70,95</b>	<b>%</b>	<b>54.265.232.000</b>	<b>72,05</b>	<b>%</b>	<b>58.020.232.000</b>	<b>72,05</b>	<b>%</b>	<b>279.931.459.050</b>		
		1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		8	Unit	985.000.000	18	Unit	2.519.040.000	2	Gedung Kantor Ruang Kelas Toilet/wc	4.932.650.000	1	Gedung Kantor Ruang Kelas Toilet/wc	2.500.000.000	5	Gedung Kantor Ruang Kelas Toilet/wc	3.000.000.000	7	Gedung Kantor Ruang Kelas Toilet/wc	3.500.000.000	41	Gedung Kantor Ruang Kelas Toilet/wc	17.436.690.000		
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		8	unit	885.170.500	14	Unit	1.633.580.000	2	Pagar Paving Block	2.811.100.000	3	Pagar Paving Block	1.600.000.000	3	Pagar Paving Block	2.000.000.000	3	Pagar Paving Block	2.400.000.000	33	Pagar Paving Block	11.329.850.500		
		1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah		4	unit	826.407.250	7	unit	1.045.365.000	0	Rehap Ruang Kelas	1.353.300.000	2	Rehap Ruang Kelas	450.000.000	2	Rehap Ruang Kelas	450.000.000	2	Rehap Ruang Kelas	450.000.000	17	Rehap Ruang Kelas	4.575.072.250		
		1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana prasarana dan utilitas PAUD yang direhab		2	Lembaga PAUD	201.777.250	2	Lembaga PAUD		0	Lembaga PAUD		2	Lembaga PAUD	600.000.000	2	Lembaga PAUD	800.000.000	2	Lembaga PAUD	1.000.000.000	8	Lembaga PAUD	2.400.000.000		
		1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																				0		-			
		1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																				0		-			
		1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD			Lembaga PAUD	-	4	paket	18.550.000	0	paket	-	9	paket	150.000.000	9	paket	150.000.000	9	paket	150.000.000	31	Lembaga PAUD	468.550.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
						7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		1.01.02.2.03.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD		5	Lembaga PAUD	-	5	Lembaga PAUD	-	0	embaga PAL	-	5	Lembaga PAUD	250.000.000	5	Lembaga PAUD	250.000.000	5	Lembaga PAUD	250.000.000	20	Lembaga PAUD	750.000.000		
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD			lembaga PAUD	-	6	Paket	206.711.300	2	Paket	42.500.000	3	Paket	550.000.000	3	Paket	550.000.000	3	Paket	550.000.000	17	10 lembaga	1.899.211.300		
		1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		6420	anak	-	6420	anak	-	6420	anak	-	6420	anak	963.000.000	6420	anak	963.000.000	6420	anak	963.000.000	32100	anak	2.889.000.000		
		1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima bantuan biaya		274	anak	-	274	anak	-	300	anak	-	325	anak	195.000.000	350	anak	210.000.000	400	anak	240.000.000	1649	anak	645.000.000		
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		3	pkt	142.900.000	8	pkt	202.300.000	30	pkt	-	30	pkt	300.000.000	30	pkt	300.000.000	30	pkt	300.000.000	131	pkt	1.245.200.000		
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang menerima biaya untuk penyelenggaraan proses belajar		439	Peserta Didik	473.300.000	439	Peserta Didik	475.775.650	439	Peserta Didik	296.305.600	440	Peserta Didik	430.000.000	445	TKN, SKB, Rumpin	430.000.000	450	TKN, SKB, Rumpin	430.000.000	2.652	TKN, SKB, Rumpin	2.535.381.250		
		1.01.02.2.03.14	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah sekolah yang mendapatkan kegiatan pelatihan EDS dan akreditasi sekolah		6	kegiatan	-	6	kegiatan	-	6	kegiatan	-	6	kegiatan	1.750.000.000	6	kegiatan	1.870.000.000	6	kegiatan	1.990.000.000	30	kegiatan	5.610.000.000		
		1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD yang menerima bantuan biaya insentif			orang	-	572	orang	5.492.099.850	650	orang	8.224.050.000	600	orang	6.996.000.000	600	orang	6.996.000.000	600	orang	6.996.000.000	3.022	orang	34.704.149.850		
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD yang mengikuti pelatihan			org	-	86	org	1.199.602.000	86	org	2.762.099.600	86	org	160.000.000	86	org	160.000.000	86	org	160.000.000	430	org	4.441.701.600		
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan / pelatihan Manajemen			lbg	-	145	lbg	430.675.800	145	lbg	324.105.000	120	lbg	120.000.000	120	lbg	120.000.000	120	lbg	120.000.000	650	lbg	1.114.780.800		
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah siswa/sekolah yang mendapatkan bantuan biaya BOP PAUD		145	Lembaga	2.197.200.000	235	Lembaga	4.258.290.000	145	tuan Pendidik	3.963.220.000	145	anak	4.241.000.000	145	anak	4.421.000.000	145	anak	4.721.000.000	960	anak	23.801.710.000		
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan	80,25	81,75	%	5.534.100.000	81,75	%	4.604.222.000	83,45	%	4.220.879.000	85,15	%	18.230.116.000	86,85	%	19.320.116.000	88,55	%	20.890.116.000	90,25	%	105.894.361.500		
		1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan			PKBM	-	6	unit	750.000.000	2	PKBM	-	2	PKBM	400.000.000	2	PKBM	400.000.000	3	PKBM	600.000.000	15	PKBM	2.150.000.000		
		1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		2	PKBM	448.700.000	2	PKBM	-	0	PKBM	-	2	PKBM	200.000.000	2	PKBM	200.000.000	3	PKBM	300.000.000	9	PKBM	700.000.000		
		1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direba	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direba		1	Ruang	74.800.000	1	Ruang	-	0	Ruang	-	1	Ruang	74.800.000	1	Ruang	74.800.000	1	Ruang	74.800.000	1	Ruang	74.800.000		
		1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang direhabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang direhabilitasi		1	Ruang	26.050.000	1	Ruang	200.000.000	0	Ruang	-	1	Ruang	200.000.000	1	Ruang	200.000.000	1	Ruang	200.000.000	5	Ruang	826.050.000		
		1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengadaan Meubeler PKBM		2	PKBM	-	2	PKBM	-	0	PKBM	-	2	PKBM	50.000.000	2	PKBM	50.000.000	3	PKBM	75.000.000	9	PKBM	175.000.000		
		1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan untuk PKBM		12	PKBM/SKB	-	12	PKBM/SKB	-	0	PKBM/SKB	-	12	PKBM/SKB	180.000.000	12	PKBM/SKB	180.000.000	12	PKBM/SKB	180.000.000	48	PKBM/SKB	540.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
						7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima bantuan		100 orang	428.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-		
		1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang terpenuhi APE		2 lembaga	147.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-		
		1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Proses Belajar PKBM/SKB		500 PKBM/SKB	320.700.000	704 Peserta Didik	1.219.212.000	459 PKBM/SKE	1.189.210.000	500 PKBM/SKB	1.546.516.000	500 PKBM/SKB	1.546.516.000	500 PKBM/SKB	1.546.516.000	3.163 PKBM/SKB	PKBM/SKB	7.368.670.000			
		1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan HAI, GTK, Lomba lomba Turun/Pamong Belajar dan Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Pokjar Kesetaraan		4 Kegiatan	-	4 Kegiatan	-	4 Kegiatan	-	4 Kegiatan	970.000.000	4 Kegiatan	980.000.000	4 Kegiatan	990.000.000	20 Kegiatan	Kegiatan	2.940.000.000			
		1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang menerima insentif Pongpes/inadin dan instruktur LKP		orang	-	278 orang	1.000.800.000	387 orang	1.365.520.000	357 orang	1.782.000.000	357 orang	1.782.000.000	357 orang	1.782.000.000	1.736 orang	orang	7.712.320.000			
		1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mengikuti Kegiatan Pelatihan penyelenggara, tutor dan Instruktur		52 PKBM/SKB, LKP	2.683.200.000	52 PKBM/SKB, LKP	-	52 M/SKB, L	-	52 PKBM/SKB, LKP	220.000.000	52 PKBM/SKB, LKP	220.000.000	52 PKBM/SKB, LKP	220.000.000	260 PKBM/SKB, LKP	PKBM/SKB, LKP	660.000.000			
		1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Lembaga PKBM/SKB dan LKP		52 PKBM/SKB, LKP	-	52 PKBM/SKB, LKP	-	245 M/SKB, L	64.349.000	52 PKBM/SKB, LKP	150.000.000	52 PKBM/SKB, LKP	150.000.000	52 PKBM/SKB, LKP	150.000.000	453 PKBM/SKB, LKP	PKBM/SKB, LKP	514.349.000			
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan dana Operasional Kesetaraan		12 PKBM/SKB	1.404.150.000	12 PKBM/SKB	1.434.210.000	12 PKBM/SKE	1.601.800.000	12 PKBM/SKB	3.538.800.000	12 PKBM/SKB	3.538.800.000	12 PKBM/SKB	3.538.800.000	72 PKBM/SKB	PKBM/SKB	15.056.560.000			
		01:01:03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>Persentase Kurikulum yang sesuai peraturan</b>				<b>100 %</b>	<b>174.862.000</b>	<b>100 %</b>	<b>115.951.000</b>	<b>100 %</b>	<b>101.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>101.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>101.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>593.813.000</b>				
		1.01.03.2.01	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>Jumlah Kurikulum yang ditetapkan</b>				<b>2 Kur</b>	<b>174.862.000</b>	<b>2 Kur</b>	<b>115.951.000</b>	<b>2 Kur</b>	<b>101.000.000</b>	<b>2 Kur</b>	<b>101.000.000</b>	<b>2 Kur</b>	<b>101.000.000</b>	<b>10 Kur</b>	<b>Kur</b>	<b>593.813.000</b>			
		1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan pelatihan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		1 Dokumen	3.740.000	1 Dokumen	3.930.000	2 Dokumen	3.740.000	2 Dokumen	3.740.000	2 Dokumen	3.740.000	2 Dokumen	3.740.000	8 Dokumen	Dokumen	18.890.000			
		1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan pelatihan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		1 Dokumen	3.740.000	1 Dokumen	3.930.000	2 Dokumen	3.740.000	2 Dokumen	3.740.000	2 Dokumen	3.740.000	2 Dokumen	3.740.000	8 Dokumen	Dokumen	18.890.000			
		1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		500 Buku	50.000.000	500 Buku	28.400.000	500 Buku	28.400.000	500 Buku	28.400.000	500 Buku	28.400.000	500 Buku	28.400.000	2.500 Buku	Buku	163.600.000			
		1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		100 org/Kegiatan	117.382.000	18 Orang	79.691.000	100 org/Kegiatan	65.120.000	100 org/Kegiatan	65.120.000	100 org/Kegiatan	65.120.000	100 org/Kegiatan	65.120.000	418 org/Kegiatan	org/Kegiatan	392.433.000			
		1.01.05.2	<b>Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	<b>Meningkatkan Persentase Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang mandiri</b>		<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>205.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>205.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>73.020.000</b>	<b>100 %</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>1.160.000.000</b>			
		1.01.05.2.02	<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	<b>Persentase ketepatan waktu pemberian hibah uang untuk lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal</b>		<b>100</b>	<b>5,88 %</b>	<b>205.000.000</b>	<b>5,88 %</b>	<b>205.000.000</b>	<b>23,53 %</b>	<b>73.020.000</b>	<b>47,06 %</b>	<b>250.000.000</b>	<b>76,47 %</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>1.160.000.000</b>			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Penilaian PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								73.020.000																	
		1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan hibah uang untuk pembinaan	600 gk	41	dokumen	205.000.000	41	Dokumen	205.000.000	41	Lembaga	-	41	Lembaga	250.000.000	41	Lembaga	250.000.000	41	Lembaga	250.000.000	246	Lembaga	1.160.000.000		
		1.01.04.2	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase peningkatan angka jumlah guru PNS yang s1 (PAUD, SD dan SMP)</b>	<b>75,36 80,39 97,04</b>	<b>80,39 97,04</b>	<b>%</b>	<b>67.000.000</b>	<b>75,36 80,39 97,04</b>	<b>%</b>	<b>1.807.904.000</b>	<b>75,36 80,39 97,04</b>	<b>%</b>	<b>731.300.000</b>	<b>75,36 80,39 97,04</b>	<b>%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>75,36 80,39 97,04</b>	<b>%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>75,36 80,39 97,04</b>	<b>%</b>	<b>360.000.000</b>	<b>75,36 80,39 97,04</b>	<b>%</b>	<b>3.566.204.000</b>		
		1.01.04.2.01	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>67.000.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.807.904.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>731.300.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>360.000.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3.566.204.000</b>		
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang menerima pelatihan peningkatan kompetensi untuk sertifikasi	600 Ptk	4	dokumen	52.000.000	15	dokumen	1.350.204.000	6	dokumen	Rp 444.410.000	6	dokumen	Rp 160.000.000	6	dokumen	Rp 140.000.000	6	dokumen	Rp 180.000.000	43	dokumen	2.326.614.000		
		1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang menerima pelatihan seleksi kepala sekolah	40 Ptk	3	Laporan	15.000.000	8	Laporan	457.700.000	9	Laporan	Rp 286.890.000	9	Laporan	Rp 140.000.000	9	Laporan	Rp 160.000.000	9	Laporan	Rp 180.000.000	47	Laporan	1.239.590.000		
		2.22.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Persentase jumlah lembaga adat tingkat Pengembangan Kebudayaan</b>	<b>5,88</b>	<b>5,88</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>5,88</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>23,53</b>	<b>%</b>	<b>196.500.000</b>	<b>47,06</b>	<b>%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>76,47</b>	<b>%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>560.000.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.756.500.000</b>		
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga adat yang dibina dengan baik	5,88	5,88	%	-	5,88	%	-	23,53	%	196.500.000	47,06	%	500.000.000	76,47	%	500.000.000	100	%	560.000.000	100	%	1.756.500.000		
		2.22.02.2.03.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1	Lembaga	-	1	Lembaga	-	3	Lembaga	Rp 196.500.000	4	Lembaga	Rp 160.000.000	5	Lembaga	Rp 140.000.000	4	Lembaga	Rp 180.000.000	17	Lembaga	676.500.000			
		2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Kegiatan Pembinaan SDM, lembaga dan pranata yang dibina	30	orang	-	30	orang	-	40	orang	Rp -	50	orang	Rp 140.000.000	60	orang	Rp 160.000.000	70	orang	Rp 180.000.000	70	orang	480.000.000			
		2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang tersedia	1	Buah/Unit	-	1	Buah/Unit	-	1	Buah/Unit	Rp -	1	Buah/Unit	Rp 200.000.000	1	Buah/Unit	Rp 200.000.000	1	Buah/Unit	Rp 200.000.000	5	Buah/Unit	600.000.000			
		2.22.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>1.188.483.000</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>548.175.000</b>	<b>62,5</b>	<b>%</b>	<b>1.858.957.000</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>590.000.000</b>	<b>87,5</b>	<b>%</b>	<b>760.000.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>930.000.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>5.719.085.000</b>		
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mega event kebudayaan yang dibuat dengan skala besar dan berdampak langsung pada masyarakat	3	1	Kegiatan	1.188.483.000	1	Kegiatan	548.175.000	2	Kegiatan	1.858.957.000	3	Kegiatan	590.000.000	4	Kegiatan	760.000.000	5	Kegiatan	930.000.000	16	Kegiatan	5.719.085.000		
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	300	orang	1.031.953.000	100	orang	548.175.000	100	orang	1.403.837.000	100	orang	450.000.000	100	orang	600.000.000	100	orang	750.000.000	800	orang	4.783.965.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi							
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
						7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitas tata kelolanya dengan baik		3	grup	156.530.000	3	grup	-	5	grup	455.120.000	7	grup	140.000.000	9	grup	160.000.000	10	grup	180.000.000	37	grup	935.120.000		
		2.22.04.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota	33,33	33,33	%	179.460.500	33,33	%	834.845.000	50	%	3.803.682.000	66,6667	%	425.000.000	83,33	%	470.000.000	100	%	520.000.000	100	%	6.232.987.500		
		2.22.04.2.01.	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota	2	2	Kegiatan	179.460.500	4	Kegiatan	834.845.000	3	Kegiatan	3.803.682.000	4	Kegiatan	425.000.000	5	Kegiatan	470.000.000	6	Kegiatan	520.000.000	24	Kegiatan	6.232.987.500		
		2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal Kab/Kota		100	orang	-	100	orang	-	120	orang	138.250.000	150	orang	90.000.000	170	orang	100.000.000	200	orang	110.000.000	740	orang	438.250.000		
		2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah yang tersedia		1	Buah	-	1	Buah	-	1	Buah	-	1	Buah	200.000.000	1	Buah	200.000.000	1	Buah	200.000.000	5	Buah	600.000.000		
		2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah		100	orang	179.460.500	100	orang	834.845.000	150	orang	3.665.432.000	200	orang	135.000.000	250	orang	170.000.000	300	orang	210.000.000	1.100	orang	5.194.737.500		
		2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya terlestarikan dan dikelola dengan baik	66,7	66,7	%	254.214.000	66,7	%	455.410.000	73,33	%	659.441.000	80,0	%	1.240.000.000	86,67	%	1.435.000.000	100	%	1.590.000.000	100	%	5.572.182.000		
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	100	100	%	61.883.000	0	%	-	83,33	%	219.331.000	69,6	%	590.000.000	70,37	%	710.000.000	66,67	%	740.000.000	86,73	%	2.259.331.000		
		2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya teregister		0	Buah/Unit	-	0	Buah/Unit	-	18	Buah/Unit	26.181.000	23	Buah/Unit	190.000.000	27	Buah/Unit	210.000.000	30	Buah/Unit	240.000.000	98	Buah/Unit	666.181.000		
		2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar budaya yang ditetapkan		15	Buah/Unit	61.883.000	0	Buah/Unit	-	15	Buah/Unit	193.150.000	16	Buah/Unit	400.000.000	19	Buah/Unit	500.000.000	20	Buah/Unit	500.000.000	85	Buah/Unit	1.593.150.000		
		2.22.05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	66,7	66,7	%	192.331.000	66,7	%	455.410.000	73,3333	%	440.110.000	80	%	650.000.000	86,67	%	725.000.000	100	%	850.000.000	100	%	3.312.851.000		
		2.22.05.2.02.01	Peindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dilindungi		10	Buah/Unit	166.046.000	9	Objek	176.500.000	11	Buah/Unit	234.600.000	12	Buah/Unit	350.000.000	13	Buah/Unit	400.000.000	15	Buah/Unit	500.000.000	70	Buah/Unit	1.827.146.000		
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dikembangkan		0	Buah/Unit	-	0	Buah/Unit	-	1	Buah/Unit	126.530.000	1	Buah/Unit	200.000.000	1	Buah/Unit	200.000.000	1	Buah/Unit	200.000.000	4	Buah/Unit	726.530.000		
		2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan		2	Buah/Unit	26.285.000	2	Objek	278.910.000	3	Buah/Unit	78.980.000	4	Buah/Unit	100.000.000	5	Buah/Unit	125.000.000	6	Buah/Unit	150.000.000	22	Buah/Unit	759.175.000		
<b>Jumlah</b>								<b>53.341.684.070,10</b>			<b>305.132.610.718</b>			<b>392.571.048.232</b>			<b>455.755.078.748</b>			<b>493.076.374.583</b>			<b>534.610.047.489</b>			<b>1.008.779.527.925</b>		

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENYESUAIAN RENSTRA DAN IKU TERHADAP**  
**PENYUSUNAN POHON KINERJA DAN CASCADING SECARA LOGICAL FRAMEWORK**  
**DAN**  
**PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR**  
**SESUAI KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 Tahun 2023**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN**  
**Nomor : 800/187/SKT/Disdikbud/2023**

Pada hari ini , Tanggal Bulan Juli Tahun 2023, kami Tim Reviu Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Nomor : 188.45 /881/SK/DISHUB-BLG/2023 Tanggal 03 Juli 2023, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dengan rincian hasil sebagai berikut :

**I. TUJUAN**

**a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu**

MISI	TUJUAN
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat balangan	- Meningkatnya indeks pendidikan
- Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	- Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya balangan

**b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Tujuan**

- Meningkatnya indeks pendidikan
- Meningkatnya budaya balangan yang dilestarikan

**c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu**

TUJUAN (setelah reviu)
- Meningkatnya indeks pendidikan
- Meningkatnya budaya balangan yang dilestarikan

**II. SASARAN**

**a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu**

TUJUAN	SASARAN
- Meningkatnya indeks pendidikan	- Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas

- Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya balangan	- Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Balangan
---	--

**b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Sasaran**

- Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan
- Meningkatkan Mutu Pendidikan
- Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya

**c. Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu**

SASARAN (setelah reviu)
- Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan
- Meningkatkan Mutu Pendidikan
- Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya

**III. INDIKATOR KINERJA SASARAN**

**a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
- Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	- Angka rata-rata lama sekolah - Angka Harapan lama sekolah
- Meningkatkan Budaya Balangan yang Terlestarikan	- Persentase Pengembangan Seni dan Budaya

**b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Indikator Kinerja**

- Angka Partisipasi sekolah anak Usia 5-6 tahun - Angka Partisipasi sekolah pendidikan dasar - Angka Partisipasi pendidikan kesetaraan
- Nilai raport pendidikan Kabupaten kategori hijau (Indeks SPM)
- Persentase cagar budaya yang dilestarikan

**c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu**

INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu)	INDIKATOR KINERJA (setelah reviu)
- Angka rata-rata lama sekolah - Angka Harapan lama sekolah	- Angka Partisipasi sekolah anak Usia 5-6 tahun - Angka Partisipasi sekolah pendidikan dasar - Angka Partisipasi pendidikan kesetaraan
- Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	- Nilai raport pendidikan Kabupaten kategori hijau (Indeks SPM)
	- Persentase cagar budaya yang dilestarikan

**IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**a. Uraian IKU Sebelum Reviu**

SASARAN	IKU
- Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	- Angka rata-rata lama sekolah - Angka Harapan lama sekolah
- Meningkatkan Budaya Balangan yang Terlestarikan	- Persentase Pengembangan Seni dan Budaya

**b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang IKU**

- Angka Partisipasi sekolah anak Usia 5-6 tahun
- Angka Partisipasi sekolah pendidikan dasar
- Angka Partisipasi pendidikan kesetaraan
- Nilai raport pendidikan Kabupaten kategori hijau (Indeks SPM)
- Persentase cagar budaya yang dilestarikan

**c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu**

IKU (sebelum reviu)	IKU (setelah reviu)
- Angka rata-rata lama sekolah - Angka Harapan lama sekolah	- Angka Partisipasi sekolah anak Usia 5-6 tahun - Angka Partisipasi sekolah pendidikan dasar - Angka Partisipasi pendidikan kesetaraan
- Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	- Nilai raport pendidikan Kabupaten kategori hijau (Indeks SPM)
	- Persentase cagar budaya yang dilestarikan

**V. TARGET KINERJA**

**a. Rincian Target Indikator Kinerja(IKS/IKU) Sebelum Reviu**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
- Angka rata-rata lama sekolah	Angka	7,82	8,09	8,36	8,63	8,9	9,17	9,17
- Angka Harapan lama sekolah		12,59	12,72	12,85	12,98	13,11	13,24	13,24

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
- Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	%	51,61%	58,06%	67,74%	80,65%	87,10%	100%	100%

**b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Target Kinerja Sasaran**

Taget Kinerja Sasaran agar disesuaikan dengan indikator kinerja sasaran yang telah direviu yang sudah sinkron dengan visi, misi, tujuan dan sasaran

**c. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Setelah Reviu**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
- Angka Partisipasi sekolah anak Usia 5-6 tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- Angka Partisipasi sekolah pendidikan dasar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- Angka Partisipasi pendidikan kesetaraan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- Nilai raport pendidikan Kabupaten kategori hijau (Indeks SPM)	Nilai			66,65	69	70	72	72
- Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	60%	66,67%	73,33%	80%	86,67%	100%	100%

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka **Tabel Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Hasil Reviu Tahun 2023**, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
							2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya indeks pendidikan	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan	Angka Partisipasi sekolah anak Usia 5-6 tahun Angka Partisipasi sekolah pendidikan dasar Angka Partisipasi pendidikan kesetaraan	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Mutu Pendidikan	Nilai raport pendidikan Kabupaten kategori hijau (Indeks SPM)	Nilai				66,65	69	70	72	72
2	Meningkatnya budaya balangan yang dilestarikan	Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%		60%	66,67%	73,33%	80%	86,67%	100%	100%

<p>Mengetahui :</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan</p>  <p>H. ABIJI, S.Pd, M.AP Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19690813 199412 1 002</p>	<p>Paringin, Juli 2023</p> <p>Tim Reviu Renstra dan IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan :</p>		
	1. Ketua Tim	IMDIYAH FADLI, S.Pd, M.AP	
	2. Anggota	ASRUJI, S.Sos, MM	

	3. Anggota	SUPRAPTO, S.Pd.MT	
	4. Anggota	MARSONO, S.Pd.SD	
	5. Anggota	HASAN, S.Sos	



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BALANGAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256).  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun

2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran

- Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
25. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
26. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Balangan Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 – 2026**

**s**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan.
12. Indikator Makro adalah indikator umum yang merupakan indikator gabungan dan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.
13. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
16. Program Prioritas adalah program yang menjadi fokus daerah dalam pencapaian visi misi RPJMD.

17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), basil (outcome), dan dampak (impact).

#### Pasal 2

- (1) Penyesuain Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2021 - 2026.
- (2) Penyesuaian Renstra PD tahun 2018-2023 bertujuan untuk integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan Daerah terhadap dokumen pembangunan nasional.
- (3) Penyesuaian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

#### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	:	PENDAHULUAN
Bab II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
Bab V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII	:	PENUTUP

- (2) Penyesuain Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penyusunan penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perangkat Daerah membentuk tim penyusun penyesuaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan pejabat terkait di lingkungan Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 25 Juli 2023

BUPATI BALANGAN,

ttd.

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

H. SUTIKNO, AP, M.AP

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 47